

LAPORAN KEGIATAN
FESTIVAL FORUM KAWASAN TIMUR
INDONESIA VIII

Lokal dan Berkelanjutan

Four Points Hotel by Sheraton, Makassar

24 - 25 OKTOBER 2018



YAYASAN BaKTI DAN FORUM KAWASAN TIMUR INDONESIA

FESTIVAL FORUM KAWASAN TIMUR INDONESIA VIII
DIPERSEMBAHKAN OLEH



KONTRIBUTOR FOTO **FARID WIDJI**

© 2018 **YAYASAN BURSA PENGETAHUAN KAWASAN TIMUR INDONESIA** DAN **FORUM KAWASAN TIMUR INDONESIA**

**Forum Kawasan Timur Indonesia dan Yayasan BaKTI
mengucapkan terimakasih
kepada para pendukung Festival Forum KTI VIII**



Pengantar

Forum Kawasan Timur Indonesia (KTI) kembali menampilkan ide-ide cerdas dan solusi pembangunan melalui pelaksanaan Festival Forum Kawasan Timur Indonesia. Tahun ini merupakan perayaan yang ke-VIII. Selama dua hari pelaksanaan di tanggal 24 - 25 Oktober 2018, para pelaku pembangunan KTI berkumpul bersama, dan saling berbagi tentang pengetahuan dan pencapaian pembangunan di daerah dan wilayah kerja masing-masing. Penyelenggaraan Festival Forum KTI tahun ini dilaksanakan di Four Points Hotel by Sheraton di Makassar, Sulawesi Selatan.

Forum Kawasan Timur Indonesia (Forum KTI) dibentuk pada tahun 2004 untuk mengembangkan kemitraan para pihak dalam menjawab tantangan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Forum ini berupaya mendukung tercapainya efektivitas dan keberlanjutan pembangunan yang bertumpu pada pembangunan yang berbasis pengetahuan dan kerjasama antar berbagai pihak.



Tujuan utama dari diselenggarakannya Festival Forum KTI adalah untuk berbagai pengalaman dalam menciptakan perubahan positif serta solusi cerdas dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Pengalaman dan solusi cerdas berbagai pihak ini kemudian diharapkan mampu merangsang kembali munculnya berbagai inovasi dalam mendorong terbangunnya kolaborasi para pihak yang lebih baik untuk pembangunan Kawasan Timur Indonesia yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pertemuan Forum KTI semakin berkembang dan berinovasi dari tahun ke tahun. Tahun ini adalah pertemuan kedelapan dan BaKTI selalu menyajikan pertemuan dalam kemasan yang berbeda dan berusaha mengedepankan lebih banyak peluang dan kesempatan untuk saling belajar, berjejaring, berinteraksi dan membuat perubahan positif. Tahun ini, Festival Forum KTI menghadirkan tiga program yang inspiratif, yaitu Panggung Inspirasi, Galeri Informasi dan Side Events. Ketiga susunan kegiatan ini dihadirkan untuk menguatkan tema yang diusung oleh Festival Forum KTI tahun ini, bertajuk “Lokal dan Berkelanjutan”.

“Lokal dan Berkelanjutan” adalah tema yang disoroti dalam pelaksanaan Festival Forum KTI tahun ini. Tema ini diangkat sebagai perayaan keberhasilan dan inovasi pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Berbagai praktik cerdas, pengalaman, dan pembelajaran dari berbagai program pembangunan di tingkat lokal untuk meningkatkan rasa kepemilikan, harmonisasi, serta memperbaiki pengelolaan program ke arah keberhasilan pembangunan nasional.

Festival Forum KTI VIII menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari Kawasan Timur, yang terbukti berhasil menjawab tantangan pembangunan di daerah masing-masing dan menghasilkan Praktik Cerdas yang layak untuk direplikasi dan dijadikan pembelajaran bersama. Kawasan Timur dengan konsep kelokalan dan upaya untuk selalu berkelanjutan menjadi fondasi yang kuat dalam menciptakan pembangunan yang kokoh oleh para penggiat pembangunan. Pada akhirnya, Kawasan Timur menjadi salah satu bagian yang saling terintegrasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di seluruh nusantara.

Hari Pertama FESTIVAL FORUM KAWASAN TIMUR INDONESIA VIII

Suasana meriah yang khas terpancar dan berbinar dalam pembukaan Festival Forum Kawasan Timur Indonesia VIII di Hotel Four Points by Sheraton Makassar. Tari *Journey of Sa'be* dari Batara Gowa membuka acara. Tarian tersebut berhasil memukau dengan properti berupa sarung-sarung bercorak tradisional. Menggambarkan kain sutra bugis yang awalnya hanya dipakai oleh masyarakat adat sebagai simbol etika, tata krama dan status sosial hingga melalui perjalanan lintas generasi, kini sutra bugis menjadi inspirasi kreatif para perancang muda untuk berkarya. Di antara sarung yang ditampilkan oleh para penari, ada yang usianya sudah ratusan tahun dan merupakan properti tradisional yang sudah langka. Festival Forum KT VIII dipandu oleh pembawa acara **Margareth Mawar Lestari** dan **Septer Manufandu**.





Berikutnya, persembahkan dari siswas-siswi sekolah dasar dari Paduan Suara Bala Keselamatan, yang menuntun hadirin dalam menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Lagu kebangsaan ini terdengar syahdu di sela-sela keberagaman para peserta. Luna Vidya selanjutnya mengajak seluruh peserta untuk mengheningkan cipta, dan bersama-sama berempati atas bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita di Lombok, Nusa Tenggara Barat; dan Palu, Donggala dan Sigi di Sulawesi Tengah. Sambil merenungi hikmahnya, Luna mengajak peserta untuk jangan menyerah dan bersatu untuk membangun kembali sembari menyerukan pertanyaan "Siapa kita?!" yang dijawab oleh peserta dengan lantang, "Indonesia!". Frase kalimat tersebut kemudian menjadi slogan yang berulang kali diserukan lantang selama dua hari berlangsungnya Festival.



Pidato sambutan pertama diawali oleh Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI, **Muhammad Yusran Laitupa** yang mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Forum. Dalam sambutannya, beliau menekankan fokus Yayasan BaKTI yaitu pertukaran pengetahuan untuk pembangunan, dimana Festival Forum Kawasan Timur Indonesia

termasuk ke dalam salah satu pilar pertukaran pengetahuan, yaitu event pertukaran pengetahuan BaKTI. Ketua Pokja Forum Kawasan Timur Indonesia, **Winarni Monoarfa** memberikan sambutan kedua, dengan mengatakan bahwa Forum KTI mengakomodir 12 provinsi di Indonesia Timur. Keberhasilan KTI dalam konektivitas dan pembangunan infrastruktur menjadi inspirasi. Inspirasi-inspirasi tersebut nantinya menjadi contoh upaya membangun dan formula lokal dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Deputy Head of Mission Australia untuk Indonesia, **Allaster Cox** menyoroti pendidikan dan kesehatan sebagai dua sektor penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan. Dalam *Human Capital Index* 2018, Indonesia menempati peringkat 87 dari 189 negara dengan *score* 0,53. Menurut Allaster, kepemimpinan lokal menjadi bagian penting untuk membangun upaya mengatasi tantangan dalam dua sektor tersebut. Allaster mengajak hadirin untuk membangun Indonesia, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan, seperti mengatasi stunting dan kekurangan gizi di Indonesia.

Seraya membuka secara resmi Festival Forum Kawasan Timur Indonesia VIII, Gubernur Sulawesi Selatan, **Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr** menyampaikan bahwa meski





dengan berbagai kemajuan pembangunan, beberapa tantangan pembangunan di Sulawesi Selatan seperti kendala infrastruktur, ancaman krisis air, dan potensi laut yang belum maksimal digarap menjadi beberapa contoh peluang sekaligus tantangan yang dihadapi oleh Sulawesi Selatan dan Kawasan Timur Indonesia. “Mari selesaikan persoalan-persoalan kebutuhan dasar masyarakat yang belum tersentuh,” himbau Gubernur Sulawesi Selatan.

Gubernur Sulsel membuka kegiatan dengan memukul gong bersama dengan Menteri PUPR, bersama dengan seluruh Dewan Pembina Yayasan BaKTI, Anggota Pokja Forum KTI, serta Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia.

Pidato Kunci dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR), Basuki Hadimuljono bertajuk “Dari Subsidi ke Belanja Produktif” menampilkan keberhasilan dan kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia.

Festival Forum Kawasan Timur Indonesia di hari pertama kemudian dilanjutkan dengan menampilkan rangkaian kisah-kisah inspiratif dari para praktisi praktik cerdas pembangunan dan inspirator Kawasan Timur Indonesia.



Hari Kedua

FESTIVAL FORUM KAWASAN TIMUR INDONESIA VIII

Hari kedua Festival Forum KTI VIII dibuka dengan Tari Tobelo. Keseruan menyeruak dengan cepat seraya para peserta beramai-ramai naik ke atas dan di sekitar panggung untuk bersama-sama bergoyang Tobelo. Tari Tobelo sendiri adalah tarian rakyat asal Maluku Utara yang merupakan tarian rakyat yang kerap dilakukan bersama-sama.

Selanjutnya Festival Forum Kawasan Timur Indonesia di hari kedua berlanjut dengan menampilkan kisah-kisah inspiratif para praktisi praktik cerdas pembangunan dan inspirator Kawasan Timur Indonesia.

Pada hari kedua, dilakukan proses Curah Ide, pada sesi ini peserta Festival Forum KTI VIII bisa saling berbagi ide dan gagasan mengenai peran mereka untuk





berkontribusi pada pembangunan. Setiap peserta duduk bersama, dan panitia membagikan sebuah lembar kerja berisi tiga pertanyaan yang relevan dengan tema Festival Forum KTI VIII yaitu “Lokal dan Berkelanjutan”. Ketiga pertanyaan tersebut adalah:

1. **Apa konsep Lokalitas?**
2. **Apa elemen pendukung keberlanjutan dan apa peran Anda?**
3. **Apa yang Anda akan lakukan setelah acara ini?**

Setiap peserta kemudian menggali potensi dan menemukan apa yang dimaksud dengan lokalitas dalam lokasi dan fokus kedaerahan masing-masing. Kemudian, para peserta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dari keberlanjutan, serta peran-peran apa yang masing-masing peserta mainkan dalam mendukung keberlanjutan.

Pada akhir hari kedua, Dewan Pembina Yayasan BaKTI dan anggota Pokja Forum Kawasan Timur Indonesia memberikan penghargaan dan secara simbolis menyerahkan apresiasi kepada para Praktisi praktik cerdas dan inspirator yang telah berkontribusi aktif memecahkan permasalahan dan tantangan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.



Pidato Kunci

“Dari Subsidi ke Belanja Produktif”

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia,
Basuki Hadimuljono

Bapak Menteri PUPR dalam pidato kuncinya melaporkan kemajuan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia.

Sejak tahun 2015, seluruh pengurangan subsidi energi dibelanjakan untuk hal-hal yang lebih produktif seperti infrastruktur. Fokus pemerintahan Kabinet Kerja adalah infrastruktur, baik itu di darat, laut, maupun udara. Kementerian PUPR secara spesifik diberikan amanah untuk menjalankan beberapa fokus pembangunan infrastruktur yaitu di darat: jalan dan jembatan. Infrastruktur kedua adalah penyediaan air; baik itu air bersih, sanitasi, pengendalian banjir, irigasi dan bendungan. Fokus ketiga dari Kementerian PUPR adalah energi, yaitu spesifik kepada PLTA. Fokus keempat dan kelima adalah komunikasi dan perumahan rakyat.

DARI SUBSIDI KE BELANJA PRODUKTIF

Pemerintah secara bertahap mengurangi alokasi subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasil penghematan dialihkan untuk kegiatan produktif, diantaranya infrastruktur, kesehatan, & pendidikan.



Pak Menteri mengungkapkan bahwa salah satu tujuan peningkatan infrastruktur adalah untuk meningkatkan daya saing bangsa. Sebagai contoh: meski bersahabat, negara-negara ASEAN sebenarnya saling bersaing ketat dalam menarik investasi, menggaet wisatawan mancanegara, dan lain-lain. Untuk itu, pencapaian peningkatan daya saing dilakukan oleh Pemerintah melalui Kabinet Kerja dengan meningkatkan capaian pembangunan infrastruktur di Indonesia. Meskipun demikian, pembangunan infrastruktur masih dirasa belum maksimal, dilihat dari kenaikan Indeks Daya Saing Global, dimana Indonesia hanya mampu naik dua peringkat ke nomor 45 setelah setahun sebelumnya berada di nomor 47. Infrastruktur untuk itu, masih sangat dibutuhkan untuk peningkatan daya saing.

KONEKTIVITAS

Pembangunan infrastruktur konektivitas didedikasikan untuk mempermudah mobilitas masyarakat bekerja dan berusaha. Selain juga demi meratanya distribusi barang/jasa, meningkatnya produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.



Pembangunan infrastruktur konektivitas diarahkan untuk mempermudah mobilitas masyarakat untuk aktivitas perekonomiannya, selain untuk menciptakan pemerataan distribusi barang/jasa. Kementerian PUPR memfokuskan konektivitas tersebut dengan pembangunan jalan dan jembatan; yaitu hingga tahun 2018 telah terbangun: Jalan nasional sepanjang 3,432 Km yang mana pembangunannya juga berada pada perbatasan di Kalimantan; Jalan tol sepanjang 941 Km, Jembatan sepanjang 39,8 Km, dan Jembatan gantung sebanyak 134 unit, termasuk yang berada di desa-desa terpencil untuk memudahkan aktivitas ekonomi masyarakat, dan memudahkan mobilitas anak sekolah untuk mendapatkan pendidikan melalui akses yang baik melalui jembatan, dan tidak lagi harus merenggang nyawa dengan menggunakan akses terbatas dan infrastruktur jembatan yang tidak memadai untuk mereka.

Pidato Kunci

“Inovasi dan Praktik Cerdas dari Desa untuk Menopang Pembangunan di Masa Depan”

Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Taufik Madjid



Dalam paparannya, Bapak Taufik Madjid melaporkan bahwa sejak 1978 – 2017, pembentukan produk domestik bruto Indonesia masih mengalami banyak ketimpangan. Konsentrasi aktivitas ekonomi selama 39 tahun masih terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera. Berdasarkan rekapitulasi dari Kementerian Desa dan PDT, dari jumlah total 122 daerah tertinggal di Indonesia, persebarannya menunjukkan bahwa 84,43% daerah tertinggal terletak di Kawasan Timur Indonesia. Belum lagi adanya ketimpangan besar antara desa dan kota di Indonesia.

Selama empat tahun pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi melalui program Kementerian Desa dan PDT telah membuahkan hasil sudah ada 60 lebih daerah tertinggal dari 122 jumlah total daerah tertinggal yang sudah meninggalkan status daerah tertinggal menjadi daerah berkembang atau daerah maju. Perkembangan ini tentunya merupakan hasil dari program pemberian Dana Desa oleh Pemerintah selama 4 tahun terakhir. Dengan Dana Desa, rakyat semakin efektif dalam mengelola pemerintahannya yang selaras dengan kebutuhannya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat di desa.

PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2015-2017



Beberapa capaian program Dana Desa diantaranya adalah; 1) Maraknya kegiatan Musyawarah Desa dan keterlibatan warga dalam perencanaan maupun eksekusi pembangunan; 2) Transparansi anggaran menjadi keniscayaan baru sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggara pemerintahan desa; 3) Keswadayaan dan gotong royong terlihat kokoh karena seluruh program harus dijalankan secara swakelola, tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga; 4) Ongkos pembangunan menjadi amat murah karena dikerjakan oleh warga desa dengan semangat keguyuban tanpa harus mengorbankan kualitas; dan 5) Munculnya berbagai upaya untuk memperkuat kapasitas warga dan pemberdayaan lestari dengan basis budaya dan pengetahuan lokal.



Namun demikian, Kementerian Desa dan PDT masih terus menggalakkan program-program untuk memajukan pembangunan di desa. Inovasi Desa hadir sebagai upaya untuk mendorong

peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa dengan memberikan banyak referensi dan inovasi-inovasi pembangunan desa serta memperkuat peran pendamping dengan banyak referensi dalam proses pendampingan di desa.



Bursa Inovasi Desa (BID) akan meningkatkan pertukaran ide dan gagasan inovasi desa, dan menjaring komitmen Pemerintah Desa untuk mengadopsi dan mereplikasi inisiatif atau inovasi yang diperoleh dalam Bursa Inovasi Desa (BID).

REPLIKASI KEGIATAN HASIL BID 2017



BID juga akan membangun ruang konsultasi desa dan meningkatkan kapasitas aparatur desa, mengkonsolidasikan pemangku kepentingan pembangunan desa dan antar desa, serta memperkuat keterlibatan OPD dan lembaga lain dalam mewujudkan pembangunan desa yang lebih inovatif dan berkelanjutan.



Showcase

Praktik Cerdas



HARI PERTAMA

Kalaodi: Kampung Ekologi Penjaga Tidore

PRESENTER **ABDUL RIWAYAT HIDI**, Lurah Kalaodi
ANAS WAHAB, Ketua Karang Taruna Kalaodi
RUSDI RASYID, Program Officer WALHI Maluku Utara

Kalaodi adalah sebuah perkampungan tua di Pulau Tidore dihuni oleh penduduk yang awalnya berasal dari kampung Soasiu, tempat berdirinya salah satu Istana Kesultanan dari Sultan Zainal Abidin Syah. Pada suatu saat, Sultan Zainal Abidin Syah memerintahkan penduduk Soasiu untuk pindah bermukim di daerah pegunungan agar terbebas dari ancaman musuh dari berbagai penjuru baik di utara, selatan maupun timur Kota Tidore. Alasan lainnya untuk menjaga agar alam dan hutan di Kalaodi tetap terjaga. Hingga saat ini, masyarakat di Kalaodi tetap merawat adat istiadat secara turun temurun, salah satunya adalah budaya melestarikan alam.

Proses pembukaan lahan dilakukan dengan cara musyawarah, yang terdiri dari dua tokoh yang dipimpin oleh *Suwohi*, pemimpin adat yang dibantu 2 orang yang membawahi dua lingkungan yaitu bagian barat dan timur Kampung Kalaodi. Kedua lingkungan ini memiliki proses masing-masing dalam



melakukan pengelolaan lahan untuk menjaga lahan tetap lestari.

Dari segi pemetaan lahan, penetapan lahan di Kalaodi terdiri dari lahan khusus pemuda, rumah tangga, lingkungan bersama dan sebagainya. Penetapan lahan ini berfungsi untuk menopang setiap aktifitas di masing-masing lingkungan di Kalaodi. Selain juga memudahkan dalam segi pendanaan pembangunan kampung. Saat ini Kalaodi mampu mendanai pembangunan kampung secara mandiri. Namun demikian, Kalaodi saat ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hutan Lindung, sehingga membatasi ruang gerak dari Masyarakat Kalaodi dalam mengelola lahan.

Rusdi Rasyid mengawali presentasinya dengan tiga hal yang mendasari WALHI mendampingi warga di Kalaodi. Pertama kearifan lokal serta tradisi adat istiadat warga yang masih terjaga hingga hari ini. Apabila di Bali ada Nyepi selama satu hari, di Kalaodi ada upacara adat 'Paca Goya' yang dilaksanakan selama tiga hari. *Paca Goya* merupakan bentuk penghargaan warga atas berkah alam atau hutan yang telah

mereka manfaatkan. Penghargaan kepada alam dalam bentuk mengistirahatkan alam selama tiga hari tanpa aktivitas apapun di Pulau Tidore.

Kedua Kalaodi sebagai penopang warga Tidore dengan menyediakan sumber air utama di Pulau Tidore. Terakhir adalah WALHI mendampingi warga mengembalikan hak-hak warga untuk mengelola lahannya. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 83 Tahun 2016 terkait Reformasi Agraris, WALHI mendorong agar Kalaodi dimasukkan sebagai perhutanan sosial. Kalaodi menjadi *antithesis* bagi bahan-bahan tambang dan perkebunan hortikultura. Kalaodi hadir sebagai laboratorium ekologi, penjaga Pulau Tidore.

Informasi lebih lanjut mengenai praktik cerdas Festival Forum KTI VIII dapat mengunjungi <http://praktikcerdas.bakti.or.id/project/kalaodi-kampung-ekologi-penjaga-tidore/>

HARI PERTAMA

Data yang Mengubah Dunia Sistem Administrasi dan Informasi Kampung dan Distrik di Papua dan Papua Barat

PRESENTER

HENKY VEKY TEWU, Asisten II Setda Kabupaten Manokwari Selatan

SONYA MARZHELINA AINUSI, Kader Kampung Waren, Manokwari Selatan

STEVEN OHEE, Kepala Distrik Sentani Timur

ANNA WINOTO, Team Leader KOMPAK

Tanah Papua dengan luas wilayah, tantangan geografis berupa gunung, hutan, dan pesisir, sebaran masyarakat yang begitu luas dan infrastruktur yang belum memadai, pemerintah dituntut untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat. Salah satunya adalah ketersediaan data kependudukan.

Keterbatasan sumber daya manusia di Papua dan tantangan geografis yang sulit menyebabkan data yang dimiliki tidak selengkap dan sebagus di tempat lainnya.

Kerjasama Kabupaten Manokwari Selatan dan KOMPAK melalui Program LANDASAN II, menginisiasi Sistem Administrasi dan Informasi Kampung dan Distrik (SAIK dan SAID) yang kemudian berjalan dengan menggunakan sistem yang sederhana. Program ini juga melatih potensi masyarakat yang ada di desa. Termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa mampu menghasilkan data kampung yang bisa diandalkan.



Di kampung Waren di Papua Barat, telah mengembangkan aplikasi SAIK. Berkat dukungan dan partisipasi KOMPAK-LANDASAN II bekerjasama dengan Mitra Turatea, warga kampung diberikan bimbingan dan pelatihan agar mampu secara mandiri mengelola data kampung. Sekarang semua data kampung dapat diakses di aplikasi SAIK termasuk dokumen penduduk maupun potensi yang dimiliki kampung.

Dengan koordinasi bersama Dinas Kesehatan, mendata golongan darah setiap warga yang kemudian didokumentasikan ke dalam SAIK. Dengan data ini apabila ada warga kampung yang sakit dan membutuhkan suplai darah, dapat terbantu dengan mengakses data SAIK untuk mendapatkan donor darah yang sesuai dengan kebutuhan.



Seluruh data SAIK yang dikompilasikan kemudian diberikan ke kepala Distrik untuk menjadi bagian dari data SAID. Di Papua, Distrik menjadi pusat data yang merupakan fakta kebutuhan pembangunan di daerah saat ini. Distrik merupakan sektor yang menghubungkan integrasi lintas sektor kesehatan, pendidikan dan kependudukan. Data SAIK dari 7 kampung semua terakomodir dalam data distrik. Dengan data distrik, dapat mengetahui potensi seluruh kampung, data demografi, dan terintegrasi dengan data di sekolah dan rumah sakit. Manfaat SAID dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat dapat mengetahui sejauh mana tingkat kesehatan mereka, karena data distrik terdapat Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Puskesmas. Apabila ada penyakit bermunculan di

masyarakat, maka dapat segera diidentifikasi, untuk kemudian berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait penanganannya. Untuk menjawab tantangan masibanyaknya kepala keluarga yang belum memiliki legalitas kependudukan, kepala kampung berkoordinasi dengan distrik dan melakukan pendataan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang mempunyai kewenangan membuat legalitas kependudukan. Dukcapil mendekatkan pelayanan ke masyarakat, dan masyarakat mengetahui kemajuan pembangunan di daerah mereka. Masyarakat menjadi pelaku pembangunan. Mereka menjadi subjek dari pembangunan, tidak menjadi objek. Ini semua bermula dari data yang terintegrasi. Kami percaya bahwa merencanakan sebuah pembangunan tanpa data berarti merencanakan sebuah kegagalan.

“Kepada Tuhan Kita percaya, kepada manusia, mana data?” begitulah Steven Ohee mengungkapkan betapa pentingnya data. Dengan data masyarakat terlayani dengan baik; layanan kesehatan, pendidikan, identitas hukum dan pemberdayaan ekonomi. Dalam upaya itu, data menjadi hal yang sangat penting karena pembangunan dan layanan tanpa data itu mustahil. Perencanaan pembangunan berbasis data, lebih responsif pada kebutuhan masyarakat. Data tidak harus dari pemerintah. Data dari masyarakat lebih valid, lebih riil, dan lebih up-to-date, masyarakat lebih tahu permasalahan di kampung-kampung setempat. Data bagi masyarakat di kampung itu memberdayakan.

Begitupun dengan adanya data di distrik yang berasal dari kampung, akan lebih siap untuk mengatasi permasalahan di tingkat distrik, mulai dari masalah kesehatan seperti HIV/AIDS dan ISPA, begitupun di ranah pendidikan dan kependudukan.

Data juga menjadi basis untuk membangun koordinasi dan kolaborasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah karena dengan data mampu menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah merespon dengan baik aspirasi tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Informasi lebih lanjut mengenai praktik cerdas Festival Forum KTI VIII dapat mengunjungi <http://praktikcerdas.bakti.or.id/project/membangun-papua-papua-barat-dengan-data/>



HARI PERTAMA

Mengubah Minyak Jelantah menjadi Biodiesel

PRESENTER **ANDI HILMY MUTAWAKKIL**, Pendiri GEN Oil
MUFLIHUN, Agen Distributor GEN Oil
ACHMAD FAUZY ASHARI, Pendiri GEN Oil

Participasi adalah satu kata yang paling tepat mewakili GEN Oil. Partisipasi dari lima ratus restoran dan rumah makan yang ada di Kota Makassar, partisipasi lebih dari seratus hotel, dan ratusan UMKM yang berkontribusi dalam proses pendistribusian dan jual beli minyak goreng bekas yang hingga hari ini berjumlah lebih dari 26.000 liter setiap bulannya.

Minyak goreng bekas atau yang lebih dikenal dengan istilah minyak jelantah kemudian diolah di pabrik GEN Oil menjadi 26.000 liter bahan

bakar biodiesel. Jumlah tersebut kemudian didistribusikan untuk keperluan melaut bagi 150 perahu nelayan.

GEN Oil hari ini membawa perubahan bukan hanya bagi sektor swasta tetapi juga rumah tangga. Hari ini, tercatat terdapat 300 lebih rumah tangga yang terlibat aktif dalam Bank Minyak Jelantah. Di sekolah, siswa-siswi dari tiga puluh sekolah di Kota Makassar turut berkontribusi dalam tabungan pendidikan untuk pendidikan lingkungan.

Pencapaian GEO Oil hari ini tidak terlepas dari partisipasi dari kelompok masyarakat. GEN Oil lahir dengan visi yang terus berkembang, terus berinovasi untuk menciptakan potensi energi baru, tetapi juga melahirkan inisiasi-inisiasi sosial dimana masyarakat bisa terlibat aktif dan secara luas. GEN Oil bekerja dengan konsep pendauran ulang, dimana minyak goreng bekas atau yang sering disebut sebagai limbah buangan ternyata dapat dimanfaatkan kembali, bahkan pemanfaatannya menjadi lebih ramah lingkungan bagi para penggunanya.

"Tepat tiga tahun lalu saya bergabung di GEN Oil, saya telah mendapatkan banyak pengalaman dan mampu menghasilkan uang sendiri tiap bulannya. Saya ke toko-toko, warung, dan hotel untuk mengumpulkan seluruh minyak goreng bekas yang dijual. Per liter



untungnya seribu rupiah, angka yang lumayan” ungkap Mufly, sapaan akrab Muflihun diawal presentasinya.

“Pemuda yang tidak mempunyai pekerjaan tetap seperti saya dulunya dianggap sebagai sampah masyarakat yang sudah tidak bisa didaur ulang lagi. Sekarang, puji syukur saya bersama rekan-rekan mempunyai predikat baru yang disematkan kepada kami: *Agent of Change*. Kami memiliki prinsip dengan perkembangan dunia yang semakin cepat dan pesat saat ini, maka tidak ada lagi yang besar mengalahkan yang kecil, tetapi yang cepat mengalahkan yang lambat” ungkap Mufly penuh semangat diakhir presentasinya.

Mengawali presentasinya dengan menyampaikan visi GEN Oil. Menurutnya tidak ada satu pun perubahan besar yang terjadi tanpa memiliki visi yang kuat. GEN Oil mempunyai visi untuk terus tumbuh dan berinovasi. Visi ini tumbuh melihat partisipasi dan respon masyarakat yang sangat positif.

Dalam lima tahun kedepan GEN Oil optimis dengan kesadaran lingkungan yang baik maka mitra strategis GEN Oil dari para pelaku usaha dan masyarakat di Sulawesi Selatan dapat meningkat dari kurang lebih 600 mitra menjadi 5.000 mitra.

Partisipasi aktif juga ditunjukkan oleh ibu-ibu rumah tangga di Kota Makassar. Saat ini, terdapat 300 ibu rumah tangga yang tergabung dalam UCO Bank. Ibu-ibu mengumpulkan minyak goreng bekas dari rumah mereka untuk dikumpulkan di check point yang telah ditetapkan di lingkungan mereka. GEN Oil menukar setiap satu liter minyak goreng bekas dengan satu gelas minyak goreng baru sebanyak 220 ml. Kedepannya GEN Oil percaya dapat mengintegrasikan 300.000 ibu rumah tangga di Kota Makassar dan sekitarnya.

GEN Oil tengah bekerjasama dengan tiga puluh sekolah dasar di Kota Makassar dengan Program Si Tampan (Tabungan Siswa untuk Pendidikan Lingkungan). Program ini memberikan kesempatan bagi siswa-siswi SD untuk berkontribusi dengan membawa minyak goreng bekas dan disetor kepada pihak sekolah. GEN Oil akan melakukan transaksi dengan pihak sekolah, 1 kilogram minyak goreng bekas dihargai dengan 2.500 rupiah dan berlaku kelipatan. Nilai ini akan terus terakumulasi dan dapat dicairkan, namun bukan dalam bentuk uang tetapi dalam program pendidikan lingkungan, seperti membayar tentor profesional untuk mengajarkan pembuatan sampah organik menjadi pupuk kompos, atau memfasilitasi siswa-siswi untuk membuat kerajinan tangan dari sampah yang didaur ulang.

GEN Oil juga mempunyai program baru bernama *My Mangrove*, yaitu program edukasi yang melibatkan anak sekolah untuk menanam bakau di tepi pantai, mereka dapat terus memantau pohon yang telah ditanam dan hingga besar nanti.

GEN Oil juga terus berinovasi dalam pengembangan produknya, dengan mengeluarkan inovasi baru bernama *Oktanbuster*. Produk ini dapat menghemat bahan bakar. Dengan mencampurkan 1 liter BBM dengan 1 tutup botol govas akan membuat pemakaian bahan bakar menjadi lebih hemat dengan jarak tempuh yang lebih jauh.

Informasi lebih lanjut mengenai praktik cerdas Festival Forum KTI VIII dapat mengunjungi <http://praktikcerdas.bakti.or.id/project/mengubah-minyak-jelantah-menjadi-bio-diesel-di-makassar/>



HARI KEDUA

PANADA Portal Analisis Data Berbasis Peta di Kota Manado

PRESENTER **MOR DOMINUS BASTIAN**,
Wakil Walikota Manado
LINY TAMBAJONG,
Kepala Bapelitbangda Kota Manado



Pemerintah daerah sejatinya akan selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Semua berlomba-lomba mencari inovasi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kota Manado memiliki permasalahan PAD, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih belum maksimal. Banyak data wajib pajak yang lokasi tempat tinggalnya tidak ditemukan. Hal ini tentu menghambat pekerjaan karena tersendatnya penyerapan PAD Kota Manado.

Kota Manado kemudian memulai proses pemetaan dengan bermodalkan peta dasar, setelah wajib pajak teridentifikasi kemudian dikembangkan dalam bentuk digitasi bangunan dan lahan di Kota Manado. Dari digitasi ini, kemudian diberi atribut, dan datanya terhubung dengan data di Badan Pengelola Pajak. Hasilnya, dapat diidentifikasi pada peta, warna hijau bagi yang telah membayar pajak dan warna merah bagi yang belum membayarkan pajaknya. Hasilnya pendapatan daerah meningkat menjadi 25%. Inovasi terus dikembangkan melalui peta, dengan memantau IMB, sekolah, dan jarak. Semuanya dapat dipantau melalui peta ini. Saat ini Kota Manado sedang mengembangkan *big data* yang idenya berawal dari inovasi PBB tadi

“Apabila semua daerah memiliki basis data, peta dasar yang sama, maka kebijakan Presiden Indonesia dengan satu data berbasis peta, maka kita semua dapat berbagi data di seluruh daerah di Indonesia, dan negara ini akan memiliki kekayaan data peta yang sangat luar biasa” ucap Pak Mor Bastian diakhir presentasinya.

Manado memiliki luas 157 km, yang terbagi atas 11 kecamatan, 87 kelurahan, dan 504 lingkungan (RT/RW). Penyusunan satu profil kelurahan dilakukan dengan melibatkan pihak lingkungan dan kelurahan. Tahapan pertama, pelatihan membaca citra beresolusi jarak tinggi dengan skala 1:50.000 yang diikuti 504 kepala lingkungan.

Melalui pelatihan ini, membuka wawasan baru bagi kepala lingkungan. Sekarang warga dapat melihat lingkungan mereka di peta dengan sangat jelas. Bimbingan juga diberikan kepada 504 kepala lingkungan untuk mengisi *form data* di wilayah lingkungan masing-masing. Setelah semua *form data* terkumpul, kepala lingkungan kemudian melakukan pengumpulan data *door to door* di tingkat kelurahan.

Sebanyak 87 lurah mendapatkan *smartphone* yang telah dilengkapi perangkat aplikasi survei di dalamnya. Hasil *input form* yang telah dikumpulkan kemudian di-*input* ke *smartphone*.

PANADA atau Portal Analisis Data berbasis Peta dikelola oleh anak muda yang baru lulus dari universitas lokal di Kota Manado. PANADA dikerjakan dalam sebuah ruangan studio data yang dilengkapi oleh seperangkat *software dan hardware* untuk mengelola data yang dikerjakan sepenuhnya oleh tenaga lokal.

Ruangan studio tersebut juga terintegrasi dengan semua data yang akan dipakai oleh perangkat daerah. Mereka pula yang akan mengolah, meng-*input* data dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi yang telah membayar kewajiban PBB. Ruangan ini juga sekaligus tempat belajar bagi generasi muda, PANADA telah menerima sebanyak 400 mahasiswa magang untuk membantu pengumpulan data di 87 kelurahan.

Seluruh usaha yang dibangun ini merupakan bentuk kolaborasi bersama. PANADA adalah usaha kolaboratif pemerintah kota dengan melibatkan masyarakat dan dunia pendidikan, dan tidak melibatkan konsultan. PANADA dari Manado mempercepat, mewujudkan kebijakan satu peta di Indonesia.

Informasi lebih lanjut mengenai praktik cerdas Festival Forum KTI VIII dapat mengunjungi http://praktikcerdas.bakti.or.id/project/portal_analisis_data_kota_manado/

HARI KEDUA

Lakoat.Kujawas

Dari Pendidikan Karakter ke Wirausahaan Sosial di Taiftob, Mollo Utara

PRESENTER

ROMO JIMMY KEWOHON, Kepala Sekolah SMPK St. Yoseph Freinademetz, 'Taiftob Mollo Utara
FINDY LENGA, Siswi Kelas Menulis Kreatif to the Lighthouse
MARLINDA NAU, Kelompok Tani dan Tenun Lakoat.Kujawas
DICKY SENDA, Inisiator Lakoat.Kujawas

Kerjasama Sekolah kami dengan komunitas Lakoat.Kujawas dimulai dengan adanya kesamaan arah dan visi mengenai pendidikan. Setiap hari Sabtu, anak-anak diberikan waktu mengembangkan diri, membentuk kelas teater, kelas sosialisasi kesehatan reproduktif, dan kelas menulis kreatif. Di akhir Tahun Ajaran lalu, sekolah kami membuat buku berjudul Kap'Nam To Fena memuat pembelajaran bagaimana mencintai kembali tradisi budaya daerah. Buku menceritakan kembali cerita-cerita orang Mollo dan orang-orang Timor yang hidup bersama dengan damai penuh kekeluargaan dan persaudaraan.

Di Komunitas Lakoat.Kujawas anak-anak bermain dan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak lepas dari identitas mereka sebagai orang Mollo. Mereka juga menyelenggarakan kegiatan seperti pementasan drama, pameran foto, dan tutur bahasa Naton dan Bonet yang terkenal di Mollo.

"Ketika kami berada di komunitas Lakoat.Kujawas, kepercayaan diri kami semakin bangkit dan semakin terasah. Identitas kami sebagai orang Mollo perlahan-lahan meningkat dan mencerminkan identitas Mollo" ungkap Findy dengan penuh percaya diri



Awalnya banyak orang tua di Mollo hanya mengenai Komunitas Lakoat.Kujawas adalah perpustakaan yang biasa meminjamkan buku kepada masyarakat. Semakin mengenal komunitas ini, semakin mengetahui bahwa komunitas ini memiliki banyak kegiatan sosial yang dilakukan, seperti latihan teater, tarian daerah, mengajar fotografi, pembuatan wine tradisional dari buah lakoat dan jambu biji.

Melihat semangat ini, para orang tua kemudian membentuk kelompok tani yang terdiri dari sepuluh orang yang bertujuan untuk mengurangi pemakaian pupuk dan pestisida kimia. Selain itu juga membentuk kelompok tenun yang terdiri dari enam orang yang bertujuan untuk menghidupkan tradisi menenun orang Mollo dengan menggunakan pewarna alami.



Hasilnya, saat ini banyak petani menanam tanaman holtikultura menggunakan pupuk organik dan penenun mulai menenun dengan kapas yang disulam dan mewarnai benang dengan tumbuh-tumbuhan. Selain itu, melalui Lakoat.Kujawas dikembangkan ekonomi kreatif dengan model kewirausahaan sosial dengan memproduksi oleh-oleh khas Mollo, seperti kopi khas Mollo, sambal lu'at, tepung jahe, jagung bose dan kain tenun Mollo.

Tahun 2016, sebanyak 18 orang muda Timor yang memiliki kesempatan berkuliah di luar Timor bertemu dan bersepakat untuk melakukan sesuatu untuk kampung halaman mereka. Pertemuan ini merupakan cikal bakal terbentuknya Komunitas Lakoat.Kujawas

Sehari-hari terdapat 140 anak di desa Taiftob mengakses perpustakaan warga, mengakses lebih dari 1.500 judul buku di

perpustakaan Lakoat.Kujawas, bergabung di kelas-kelas kreatif.

Lakoat.Kujawas juga berkolaborasi dengan mama-mama di Mollo, dengan para petani, bersama dengan Romo Jimmy memiliki mimpi yang sama, agar kampung mereka dapat menjadi tempat yang nyaman bagi semua lapisan masyarakat.

Kewirausahaan sosial dianggap menjadi model ekonomi masa depan untuk para kaum muda dan masyarakat umum di Mollo melalui pendekatan baru warga yang aktif (*Active Citizen*) yang memiliki kepedulian dan kesadaran untuk mengenali potensi yang ada di masyarakat. Bergerak bersama dan bersinergi membangun kewirausahaan sosial.

Bentuk ekonomi kreatif ini dibangun untuk merespon tantangan mama-mama penenun dan petani yang mengalami kesulitan mengakses pasar yang hanya ada seminggu sekali. Kewirausahaan sosial ini menciptakan peluang pengembangan ekonomi baru bagi semua yang ada di komunitas Taiftob.

Keuntungan yang diperoleh tidak hanya kembali ke penenun dan petani, tetapi sebagian untuk pengembangan komunitas dan kampung, melalui kelas menulis kreatif, dan seluruh kegiatan kreatif yang dikembangkan di komunitas. Komunitas muncul sebagai ruang kerja kolaborasi, tempat mengumpulkan ide dan inisiatif untuk berkembang.

"Komunitas Lakoat.Kujawas menaruh harapan besar terkait Revitalisasi desa, khususnya desa-desa di Timor dewasa ini banyak kehilangan orang-orang muda, karena harus dan terpaksa menjadi buruh sawit di Kalimantan atau tenaga kerja di Malaysia. Hal ini terjadi karena tidak ada ruang dan kesempatan yang diberikan oleh kita sendiri. Sudahkah kita berfikir untuk pulang dan bangun kampung dan desa kita? Kami percaya bahwa dua puluh tahun lagi akan ada 140 anak Desa Taiftob yang berkesenian, belajar tentang kebudayaan, identitas sendiri sebagai orang Mollo. Mereka akan menjadi tuan tanah di kampung sendiri"ucap Dicky Senda mengakhiri presentasinya.

Informasi lebih lanjut mengenai praktik cerdas Festival Forum KTI VIII dapat mengunjungi <http://praktikcerdas.bakti.or.id/project/dari-pendidikan-karakter-ke-kewirausahaan-sosial-di-kapan-mollo-utara/>



A woman wearing a traditional striped dress and a headband is speaking into a microphone. She is standing in front of two large, vertical bundles of colorful fiber, likely made of natural materials like cotton or wool, dyed in various colors including red, orange, yellow, green, and purple. The background is a plain, light-colored wall.

Inspirator

HARI PERTAMA

INSPIRATOR

Sabang Merauke : Seribu Anak Bangsa Merantau untuk Kembali

MEISKE DEMITRIA WAHYU



Meiske Wahyu berbicara mengenai prasangka, opini, persepsi yang tidak terhindarkan di seluruh penjuru Indonesia. Tidak ada pilihan untuk menghindari prasangka, tapi punya pilihan untuk membiarkan, mendiamkan, maupun mendobrak prasangka tersebut.

Berbicara tentang prasangka, ada survei yang dilakukan kepada seribu lima ratus pelajar di 34 provinsi di Indonesia. Hasilnya cukup mengejutkan, ada sekitar 890 pelajar yang dikepalanya mempunyai opini intoleransi pada orang lain yang berbeda identitas. Meskipun tidak menjadi aksi, namun opini ini didiamkan, turun menurun diwariskan tanpa ada yang memberitahu bahwa itu salah, malah bisa berkembang menjadi benih kebencian.

Meiske dan enam orang sahabat percaya bahwa adalah perlu untuk menciptakan pengalaman yang diberikan kepada sebanyak mungkin anak muda di Indonesia untuk bisa berinteraksi dengan keberagaman. Untuk bisa punya saudara dari berbagai titik di Indonesia. Ini penting agar memberikan opsi kepada mereka untuk tumbuh besar dengan pikiran yang lebih terbuka, dan niscaya mereka akan tumbuh menjadi pemimpin untuk mewujudkan Indonesia yang lebih damai.

Meiske dan enam orang sahabat kemudian membangun SabangMerauke enam tahun lalu, yaitu sebuah program pertukaran pelajar dimana setiap tahun 15 orang anak-anak dari berbagai titik di Indonesia akan tinggal selama tiga minggu di rumah famili SabangMerauke dan didampingi kakak SabangMerauke dari Jakarta. Mereka beraktivitas dengan keluarga dampingan yang berasal dari

latar belakang yang berbeda. Peserta SabangMerauke tersebut akan kembali ke daerah masing-masing dengan pikiran yang lebih terbuka dan menjadi duta perdamaian di daerahnya.

“Bhinneka Tunggal Ika itu bukan sejarah, tetapi betul-betul bagian dari jati diri bangsa. Kita semua harus lebih bertoleransi dan membuka pikiran,” ujar Meiske.

Dari pertukaran ini muncul pribadi-pribadi dengan nilai toleransi yang lebih dalam. Vesli dari Rote Ndao, seorang anak remaja yang dengan lantang mengatakan bahwa Islam bukan agama teroris setelah tinggal bersama keluarga muslim di Jakarta. Lalu, kisah Vania, gadis Bengkulu keturunan Tionghoa katolik asal Bengkulu yang bersahabat dengan seorang gadis Konawe berkerudung karena sama-sama menyukai Drama Korea. Begitulah persahabatan. Begitulah kekuatan Indonesia.

Keberanian untuk mengubah apa yang bisa diubah. Enam tahun lalu, SabangMerauke hanya berjumlah tujuh orang. Sekarang, sudah ada 4.000 pendaftar dan 90 adik-adik SMP yang sudah berangkat ke Jakarta yang terpapar dengan nilai toleransi kebhinekaan dan pendidikan. SabangMerauke dibantu oleh lebih dari 1.000 relawan yang percaya bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang lebih damai dan toleran.

“Kita semua harus lebih terbuka lagi untuk berkenalan dan berinteraksi dengan orang-orang yang jauh berbeda dengan kita, dan juga jangan pernah diam melihat perilaku intoleransi, karena kita semua punya suara, dan punya nilai kebhinnekaan sebagai bagian dari Indonesia. Kita percaya toleransi tidak cukup hanya diajarkan. Toleransi harus dialami dan dirasakan.” Ujar Meiske.



HARI PERTAMA

INSPIRATOR

Reses Partisipatif, Narasi Publik di Legislatif

CH Aidir Syam, Ketua DPRD Kabupaten Maros

Kaharuddin Kadir, Ketua DPRD Kota Parepare

Nurjannah, Kelompok Konstituen Kota Parepare

Hadir untuk berbagi kisah inspiratif dan pengalaman mengenai Reses Partisipatif di daerah masing-masing adalah Chaidir Syam, Ketua DPRD Kabupaten Maros; Nurjannah, Kelompok Konstituen Kota Parepare; dan Kaharuddin Kadir, Ketua DPRD Kota Parepare.

Dalam pemaparannya, Chaidir Syam mengatakan bahwa reses dulu dilakukan secara konvensional di Kabupaten Maros, yaitu para anggota legislatif melakukannya sebanyak tiga kali setahun. Namun demikian, persepsi yang muncul adalah masyarakat menganggap bahwa anggota dewan hanya datang ceramah, makan-makan, dan kemudian memberikan uang transport bagi masyarakat yang datang. Penguatan kapasitas dari Program MAMPU-BaKTI kemudian hadir dan memperkenalkan metodologi partisipatif, agar lebih dekat dan lebih mendalam mengenal masyarakat. Lalu, peserta reses harus merepresentasikan seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan, anak, dan kelompok disabilitas atau kelompok marginal lainnya. Harapannya adalah bahwa pokok-pokok pikiran konstituen yang dihasilkan melalui metode partisipatif ini bisa dimanfaatkan oleh anggota dewan untuk menyelaraskannya dengan perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten.

“Kami para anggota dewan di Maros tidak menganggap reses sebagai beban, tetapi sebagai wadah dan media untuk lebih dekat dengan masyarakat dan menemukan solusi untuk pembangunan di daerah kami” Chaidir Syam, Ketua DPRD Kabupaten Maros.

Nurjannah, Ketua Kelompok Konstituen Kota Parepare mengaku diawal beliau tidak mengetahui apa itu reses; apa yang dilakukan pada saat reses, dan siapa saja yang hadir saat reses. Hal tersebut karena reses konvensional yang dilakukan sebelumnya tidak banyak melibatkan kelompok perempuan, sehingga para anggota dewan dan metode penyampaian aspirasi konstituen masih asing bagi

Nurjannah. Saat ini, melalui reses partisipatif, Nurjannah dan segenap anggota kelompok konstituen menyampaikan masalah-masalah riil yang muncul di masyarakat untuk didiskusikan dan disampaikan kepada anggota dewan. Masalah-masalah seperti kesehatan bagi ibu hamil, masalah gizi bayi dan balita, masalah jaminan kesehatan, serta masalah penting seperti kekerasan bagi perempuan dan anak sering disampaikan pada saat reses. Kedekatan legislatif dan konstituen yang diwakilinya semakin tumbuh saat ini, dan bisa berkomunikasi langsung secara informal untuk menyampaikan usulan dan masalah.

“Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Parepare telah dikeluarkan sebagai buah hasil dari proses reses partisipatif di kota kami. Terimakasih kepada anggota dewan Kota Parepare karena melangsungkan proses ini” Nurjannah.

Seirama, Kaharuddin Kadir mengemukakan bahwa gagasan reses partisipatif muncul setelah DPRD Kota Parepare diberikan pendampingan oleh Program MAMPU-BaKTI setelah melihat adanya perbaikan yang perlu dilakukan pada metode konvensional dari proses reses. Sebagai contoh, proses reses mengenai kebutuhan nelayan dulunya tidak melibatkan nelayan itu sendiri. Model reses partisipatif melibatkan langsung para pelakunya; yaitu nelayannya, kelompok perempuannya, kelompok marginalnya, dan elemen lainnya; sehingga aspirasi yang disampaikan adalah betul-betul merupakan kebutuhan prioritas masing-masing.

Kedepannya, Kaharuddin menyerukan pentingnya model reses ini untuk diadopsi sebagai model reses di seluruh Indonesia. Perlu adanya usaha untuk mendorong proses reses partisipatif yang kemudian dibuatkan regulasinya untuk mengadvokasi pentingnya pengaplikasian proses ini yang merespon kebutuhan langsung yang ada di masyarakat.

HARI PERTAMA

INSPIRATOR

Inovasi Desa Membangun Tradisi Berbagi Gagasan

SAMSUL WIDODO,

Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal,
Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



Samsul Widodo dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggagas sebuah Sistem Dokumentasi Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal di Indonesia sebagai solusi pembangunan desa tertinggal. Gagasan ini meyakini tradisi pertukaran pengetahuan dan kerjasama akan memicu perubahan yang sangat mendasar pada kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Gagasan ini berasal dari inspirasi Samsul pada saat melihat anak-anak muda menjual ikan segar yang mereka tangkap secara *online*. Hal ini terjadi karena separuh dari penduduk Indonesia bisa mengakses internet, termasuk di bagian Timur Indonesia.

Samsul kemudian mencoba mengaplikasikan metode penjualan online tersebut. Memanfaatkan komoditas alpukat Mentega Soe dari Kabupaten Timor Tengah Selatan yang merupakan jenis alpukat terbaik di Indonesia. Bagaimana mengangkut alpukat ini ke Jakarta? Dengan menerapkan konsep *Fair Price*.

Harga di Jakarta 50.000 rupiah per kilogram, sementara di Soe hanya 2.000 rupiah. Samsul mencoba pendekatan penjualan *online* dengan memperkenalkan metode tersebut kepada petani alpukat, yang akhirnya bisa menjual alpukatnya sebesar 38.000 rupiah per kilogram dengan pengiriman ke Jakarta. Para petani alpukat kemudian diberikan pendampingan untuk aplikasi *online* untuk memasarkan produknya.

Kualitas budidaya, kualitas komoditas, kualitas pengiriman adalah isu utama yang ditekankan dalam pengembangan pemasaran online ini. Ketiga komponen ini merupakan tiga hal yang perlu ditekankan agar petani mendapatkan harga yang pantas dan berimbang untuk produk alpukat mentega yang mereka tawarkan. Dari kualitas budidaya, perawatan tanaman alpukat perlu diperhatikan dari pembibitan sampai dengan proses panen. Pembibitan yang sehat,

lingkungan yang bersih dan terawat, dan terhindari dari serangan hama merupakan titik kembang yang menjadi fokus dalam memastikan budidaya alpukat tetap berkualitas.

Kualitas komoditas menekankan pada konsep *Fair Price Accuration*, yaitu memastikan identifikasi tingkat kematangan pada tiap buah alpukat yang diproduksi. Selain itu, penekanan komoditas adalah penyiapan produk olahan seperti alpukat beku dan pasta alpukat seperti guacamole dan hasil pasca panen dengan baik. Isu terakhir adalah isu pengiriman, yang termasuk *packaging*. Pembungkusan biasa akan mengakibatkan berkurangnya kualitas produk hingga 30 persen, pembungkusan menggunakan kayu akan mengakibatkan hilangnya kualitas produk sebesar 5-10 persen. Untuk itu, demi memastikan kualitas pengiriman, Kementerian Desa dan PDT mengembangkan kerjasama dengan PT. Pelni atau PT Pos Indonesia untuk memastikan *storage* yang sejuk dalam proses pengiriman sehingga kualitas produk alpukat yang dikirimkan tidak berkurang.

Sistem Dokumentasi Inovasi Desa dan Daerah Tertinggal di Indonesia mendokumentasikan praktik baik dan keberhasilan desa-desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang didokumentasikan menjadi pengetahuan yang terstruktur sehingga dapat direplikasi secara luas. Desa-desa kreatif dan inovatif lahir untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal, perbaikan mutu sumberdaya manusia, dan replikasi teknologi; yang pada akhirnya menguntungkan dan memajukan petani dan masyarakat kecil di desa dan daerah tertinggal. Dalam hal ini, Samsul Widodo mengajak para pelaku pembangunan di Kawasan Timur Indonesia untuk sama-sama mengarusutamakan dan memanfaatkan teknologi sebagai bagian penggerak pembangunan bersama di wilayah Timur Indonesia.



HARI KEDUA

INSPIRATOR

**Laporan Dari
Garis Depan**

ESTER WANIMBO

Ester Wanimbo adalah seorang perempuan Papua yang membulatkan tekadnya untuk mengabdikan dengan memberikan pendidikan bagi perempuan di daerahnya, yaitu Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua. Hadir sebagai Inspirator Forum KTI hari ini, ibu Ester berbagi pengalaman mengajar perempuan-perempuan di pedalaman untuk membaca, menulis, dan berhitung.

Ester sendiri mengaku tidak bisa membaca meski memulai bersekolah dari kelas 1 sampai kelas 5 di Sekolah Dasar. Baru pada kelas 6 SD baru Ester bisa membaca. Mengapa? Karena Ester belum merasakan pembangunan yang sebenarnya karena berada di balik gunung, dengan jangkauan sekolah yang sangat jauh. Ester bersekolah hingga tamat SMP dan SMA, hingga bisa melanjutkan sekolah ke tingkat perguruan tinggi di Manado.

Setelah mendapatkan gelarnya, Ester kembali ke kampung halaman dan merasa gelisah. Beliau bertanya kepada diri sendiri dan mengapa beliau belum banyak berbuat untuk negerinya, kampungnya dan tanahnya. Ester bertekad untuk harus membuat sesuatu untuk masyarakat di kampungnya.

Ester kemudian mulai mengembangkan usaha noken dari kulit kayu yang diajarkan secara turun temurun dari orang tuanya. Kemudian membuka usaha kecil dan kios kecil. Ester lalu menawarkan mama-mama di kampung untuk menitip noken yang mereka buat untuk dijual di kios kecil Ester. Tidak berhenti sampai

disitu saja, Ester kemudian mengajar mereka dengan membaca, menulis, dan berhitung. Bukan tanpa tujuan, mereka diajarkan membaca dan berhitung agar mereka bisa mengerti tentang firman dan kebenaran Tuhan, serta mampu menghitung uang masuk dan uang keluar.

Mama-mama yang diajar oleh Ester kemudian bisa menghasilkan uang untuk mencukupi kehidupan mereka berkat kemampuan membuat noken, membaca dan menulis yang diajarkan oleh Ester. Banyak dari anak-anak dari mama-mama tersebut melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, bekerja jadi pegawai negeri sipil, anggota dewan atau dokter dari hasil menjual noken. Noken adalah salah satu ciri khas dan kebanggaan wanita Papua, yang berfungsi mengisi bahan makanan sebanyak mungkin seperti sayuran, umbi-umbi dan lainnya.

Ester bangga menjadi anak daerah yang tinggal di balik gunung. Selain noken biasa, dalam perjalanannya berbagai kreasi-kreasi baru yang muncul seperti baju, ikat pinggang, hingga tempat laptop atau rok perempuan. Noken adalah warisan yang diberikan Tuhan. Perempuan Papua mempunyai potensi yang luar biasa untuk berkembang. Ester yakin, dia akan pulang membawa kesan yang besar pada Forum Kawasan Timur Indonesia untuk semakin membangun kampungnya sendiri, negerinya sendiri, terus melanjutkan pembangunan untuk orang-orang Papua.

HARI KEDUA

INSPIRATOR

**MallSampah –
Layanan Pengelolaan
Sampah Online**

ADI SAIFULLAH PUTRA



Adi Saifullah adalah inisiator MallSampah (www.mallsampah.com), sebuah platform berbasis web pengelola sampah online pertama di Indonesia. MallSampah melayani penjualan sampah dan pendauran ulang sampah secara cepat dan gratis dengan tujuan mengalihkan sampah yang akan dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Melalui MallSampah, sampah dapat bernilai ekonomi sekaligus mempunyai dampak sosial karena memberdayakan pengepul dan pemulung.

Ide MallSampah diinisiasi Adi dari fakta bahwa 35,5 miliar dari Produk Domestik Bruto di sektor pengelolaan sampah dan daur ulang adalah hasil dari 10 persen sampah daur ulang di Indonesia. Artinya, ada 90 persen sampah yang tidak terkelola dan tidak didaur ulang. Persentasi sampah yang didaur ulang menurut Adi perlu ditingkatkan hingga 20 atau 30 persen setiap tahun.

“Kami melihat bahwa pengepul tradisional dan pemulung sebagai potensi pengelola sampah secara nasional. Mereka adalah kunci dari rantai daur ulang sampah di Indonesia. Jumlah pekerjaannya juga sangat besar, contohnya di Makassar terdapat kurang lebih lima ribu pengepul dan pemulung, belum lagi di kota-kota besar lainnya,” ujar Adi.

Dari total 187,2 juta ton sampah yang dihasilkan setiap hari, 60 persen adalah sampah makanan atau sampah organik, dan 40 persen adalah sampah non-organik yang bisa didaur ulang seperti plastik, elektronik, botol, kertas, dan lainnya yang bisa bernilai ekonomi. Begitu pula sampah basah, bisa diberikan pada produsen kompos untuk memproduksi kompos.

Permasalahan utama selama ini adalah masyarakat umum sebagai penghasil sampah tidak memiliki akses kepada pengepul dan pemulung, dan sebaliknya. Dengan demikian, Adi mengidentifikasi

bahwa masalah pengelolaan sampah juga dapat disoroti dari minimnya manajemen data dan informasi. Untuk itu, Adi menggunakan teknologi untuk membuat *platform* yang menghubungkan kedua pihak yang dianggap perlu berinteraksi, menciptakan *supply* dan *demand* dalam pengelolaan sampah dan meningkatkan angka daur ulang sampah.

MallSampah bermitra dengan perusahaan transportasi *online* untuk memberdayakan pengepul dan pemulung sampah. Saat ini, di Kota Makassar sudah ada 100 pengepul lokal di Kota Makassar, 1000 pengguna aktif bulanan, dan telah mendaur ulang lebih dari 100.000 kilogram sampah sejak tahun 2017.

“Kami menjadikan MallSampah sebagai alat perubahan di sektor pengelolaan sampah dan daur ulang. Dengan menggunakan teknologi digital, kami menawarkan layanan jual beli sampah *online* dengan mudah dan praktis, bisa digunakan dalam cakupan rumah tangga, restoran, hotel, dan industri lainnya,” imbuh Adi.

Adi hadir berbagi inspirasi sebagai salah satu Inspirator di Festival Forum KTI VIII. Adi memulai merintis usahanya bersama salah seorang rekan yang juga belajar di Universitas Muslim Indonesia. Di tahun 2015, www.mallsampah.com menjadi salah satu finalis Teras Usaha Mahasiswa Nasional. Di Desember 2017, mereka juga mendapatkan penghargaan di *ASEAN Rice Bowl Startup Award* yang diadakan di Malaysia untuk kategori *Most Social Impact Startup*.

Adi menutup presentasinya dengan menekankan bahwa misi MallSampah tidak semata-mata pada keuntungan materi dan uang, tetapi juga membawa semangat kewirausahaan sosial – memberdayakan pemulung lokal, dan meningkatkan angka daur ulang sampah dari 10 persen hingga 40 persen.”

HARI KEDUA

INSPIRATOR

PASIKOLA, Masa Depan Transportasi Publik di Kota Makassar

MANSYUR RAHIM

Pembangunan kota yang semakin besar dewasa ini membuah konsekuensi masalah lain yang cukup besar. Makassar, dalam perkembangannya menimbulkan kemacetan transportasi di banyak jalan utama di kota yang mengakibatkan terhambatnya warga melakukan aktivitas hariannya. Untuk itu, Pemerintah Kota Makassar mengembangkan inovasi-inovasi baru berbasis masyarakat untuk menanggulangi isu kemacetan yang mulai marak di kota Makassar.

PASIKOLA atau singkatan “Pete-Pete Anak Sekolah” yang juga dalam bahasa Makassar berarti pelajar adalah moda transportasi publik khusus anak sekolah yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Makassar. Sekarang PASIKOLA memiliki 10 armada yang melayani 8 sekolah, dimana 190 siswa setiap hari diantar jemput oleh PASIKOLA. Dari 190



siswa tersebut, 80 persen sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi untuk mobilisasi ke sekolah. Dengan menggunakan PASIKOLA yang dapat mengakomodir 10 anak untuk satu armada PASIKOLA, berarti mengurangi 10 kendaraan pribadi di jalan-jalan di Makassar pada jam masuk dan pulang sekolah. Saat ini, sudah ada kurang lebih 90 kendaraan pribadi yang berkurang di jalan-jalan Makassar setiap harinya setelah PASIKOLA resmi beroperasi.

Mansyur Rahim, Program Manager PASIKOLA-BaKTI kemudian menerangkan, PASIKOLA tidak hanya berkontribusi positif pada angka-angka tersebut, tetapi selama dua tahun terakhir beroperasi, banyak hal positif yang terbangun sejak adanya PASIKOLA. Perubahan perilaku anak-anak sekolah kemudian muncul yang diutarakan oleh para orang tua; mereka semakin rajin bangun pagi dan beribadah; dan mereka tidak lagi menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah yang tidak aman bagi mereka. Hal ini tidak lepas dari para supir PASIKOLA yang telah diberikan pendampingan dan menjadi pengemudi profesional dan terlatih.

PASIKOLA adalah masa depan transportasi publik di Makassar dalam menjawab tantangan perkotaan tersebut. PASIKOLA sendiri bukan merupakan solusi yang muncul secara tiba-tiba. Selama dua tahun terakhir, PASIKOLA melewati berbagai proses melalui workshop-workshop transportasi untuk mengurai kemacetan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota, Yayasan BaKTI, UNDP, dan Pulse Lab. Pelaksanaan berbagai workshop ini mengundang banyak pihak seperti Dishub, Dinas Pendidikan, Organda, Kepolisian, media, akademisi, penyandang disabilitas, dan komunitas kreatif.

Workshop-workshop ini melihat potensi lokal yang semakin tersisih karena hadirnya transportasi *online* dan tingginya kepemilikan kendaraan pribadi. Makassar mempunyai *pete-pete*, moda transportasi lokal yang khas, yang jumlahnya mencapai 4000 armada. Apabila bisa dialihfungsikan menjadi layanan antar jemput

tentu akan berkontribusi pada pengurangan penggunaan kendaraan pribadi yang tentunya akan berdampak pada penguraian kemacetan pada jam-jam tertentu di Kota Makassar.

Workshop ini kemudian diikuti dengan proses inkubasi, yaitu melakukan wawancara dengan para potensi pengguna PASIKOLA yaitu para orang tua, guru di sekolah, siswa, dan warga. Dalam proses identifikasi tersebut, muncul stigma yang kerap disematkan kepada supir *pete-pete*, yaitu ugul-ugalan dalam berkendara. PASIKOLA merespon dengan mengubah citra negatif para supir tersebut dengan melakukan pendampingan dan pelatihan mengemudi yang aman dan bertanggungjawab, dan mematuhi rambu lalu lintas. Armada PASIKOLA kemudian dilengkapi dengan berbagai perangkat keamanan dan kenyamanan untuk siswa diatas *pete-pete* PASIKOLA. Pengembangan PASIKOLA juga diarahkan pada pengembangan aplikasi berbasis *online* untuk melacak mobilitas *pete-pete* yang sementara membawa anak sekolah.

Berkembangnya PASIKOLA dan manfaatnya dirasakan oleh berbagai pihak. Tahun ini PASIKOLA berhasil meraih penghargaan juara 1 untuk kategori Smart Mobility Transportation dalam kompetisi *Smart City Forum* di Taiwan yang diikuti oleh 200 negara. PASIKOLA membawa nama negara dan kota Makassar memenangkan kompetisi tersebut. PASIKOLA juga memenangkan juara 1 untuk kategori yang sama dalam Co-Creation Competition 2018 yang diselenggarakan oleh Yayasan Cipta Generasi Indonesia.

Dalam proses dua tahun PASIKOLA, ada dua pelajaran penting yang didapatkan, yaitu bahwa apapun masalah perkotaan akan dapat terpecahkan apabila seluruh pihak berkolaborasi dan berfikir bersama dan mengerjakan solusi bersama-sama. PASIKOLA adalah hasil dari pendekatan *human center design* berbasis kebutuhan masyarakat untuk memecahkan masalah transportasi kota Makassar.

shas.

HARI KEDUA

INSPIRATOR

Orang Timur Bicara
SATRIADDIN "ARIE KRITING"

Orang Timur Bicara

Arie Kriting tampil dengan nuansa berbeda di Festival Forum Kawasan Timur Indonesia VIII, yaitu sebagai Inspirator yang membawa materi keren bertajuk “Orang Timur Bicara”. Dengan tema ini, Arie Kriting menyampaikan beberapa pertanyaan utama:

Apakah kita saat ini tetap menjadi Orang Timur?

Definisi Orang Timur menurut Arie tidak ada yang tahu pasti; apakah setiap orang dengan kepedulian ke Timur menjadi Orang Timur, atau identitas sebagai orang berambut keriting, berkulit gelap, dan mata menyala? Belum ada definisi yang konkrit mengenai siapa yang disebut dengan Orang Timur.

Lokalitas, yang merupakan tema sentral Festival Forum KTI tahun ini menurut Arie, adalah tema yang penting karena lokalitas harus menjadi bahan bakar utama untuk mengejar ketertinggalan. Perkembangan zaman memodernisasi segala lini tanpa menimbang mana yang merupakan ketertinggalan dan yang mana merupakan kekayaan budaya dan ciri khas. Selain itu, ada kesan akhir-akhir ini bahwa Orang Timur takut menjadi berbeda, yang menyebabkan terkikisnya identitas.

Haruskah kita menjadi Orang Timur?

Arie mengatakan, penting untuk kita sebagai Orang Timur untuk mengetahui dari mana kita berasal. Peradaban Orang Timur itu maju, besar dan megah, tetapi sangat sedikit pembahasan tentang sejarah Orang Timur di kurikulum pendidikan kita. Sangat penting, bagi Arie agar Orang Timur mengenal sejarah mereka sendiri, agar kita semua mengetahui fakta bahwa Timur Indonesia merupakan bagian penting bagi bangsa ini.

“Melanesia”. Banyak ras dalam bangsa ini sering disebutkan dan ditunjukkan keberadaannya, seperti Melayu, Cina, dan Arab. Namun, jarang bagi kita untuk membahas ras Melanesia, yaitu ras mayoritas di timur Indonesia. Arie mengingatkan bahwa Indonesia adalah kumpulan dari berbagai ras yang disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berbicara tentang kesatuan dalam keberagaman, tapi tidak menistakan perbedaan. Karakter Melanesia merupakan bagian dari bangsa ini, baik itu karakter fisik, dan budayanya yang mempunyai kekhususan yang tidak boleh takut untuk dibicarakan. Melanesia adalah fakta dan bagian dari kekayaan bangsa, dan Orang Timur harus berani menunjukkan identitasnya.

Arie menutup dengan menyerukan bahwa memajukan orang Melanesia atau Orang Timur merupakan upaya untuk memajukan Indonesia secara keseluruhan.





Side Event



Papua Insights

Didukung oleh **KOMPAK**

NARA SUMBER

- Antoneta Melangsena** (Guru SDN Inpres Yongsu Kecil, Distrik Revenirara, Jayapura)
- Fredrik Teurupun** (Fasilitator Tim Malaria Kampung Kab. Fakfak)
- Wemfrid Wally** (Kepala Kampung Nendali, Jayapura)
- Septer Manufandu** (Perwakilan Organisasi Masyarakat)
- Andry Damir, SIP, M.Si** (Ketua Sekber Provinsi BANGGA Papua)

PENANGGAP

- Dr. Yusharto Huntoyugo, M.Pd** (Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD – Kemedagri)
- Alpius Toam ST, M.MT** (Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura)
- dr. Victor Eka Nugrahaputra, M.Kes** (Kabid. Pelayanan Kesehatan – Dinas Kesehatan Papua Barat)
- Allaster Cox** (Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia)
- Astrid Kartika** (Unit Manager Kedutaan Australia)

Papua Insights bertujuan memberi sudut pandang mengenai pertanyaan kondisi pembangunan Papua saat ini: bagaimana wajah pelayanan publik saat ini? Ketika pelayanan publik memiliki *platform* teknologi untuk membangun data, berbasis masyarakat kampung, apakah yang bisa dipelajari dari sana? Papua Insights juga memberi ruang untuk inovasi bagi BANGGA Papua, sebuah inisiatif berbasis sistem, pemetaan wilayah masyarakat adat dan pendanaan otonomis khusus yang sedang diujicobakan.

Pembangunan Papua harus dapat didefinisikan oleh orang (asli) Papua sendiri. Definisi yang dibangun dalam pola pikir orang Papua, bukan generalisasi konsep-konsep pembangunan yang diharapkan memberi hasil yang sama.

Berbicara Papua adalah bercerita akan kemajuan. Kemajuan yang tidak bisa digeneralisasi dengan standar kemajuan tempat lain di Indonesia. Kemajuan ini, harus dilihat dari dalam: bagaimana dari konsep-konsep budaya yang tidak akomodatif terhadap gagasan-gagasan asing, di kampung telah tumbuh partisipasi masyarakat untuk menerima hal-hal baru tersebut. Hal ini bisa dilihat pada model suku dimana tumbuh kelompok perwakilan masyarakat yang lebih



luas dan mengakomodir perempuan untuk menyuarakan persoalan-persoalan kesehatan.

Membangun konteks lokal dalam dunia pendidikan yang dibangun dengan pendekatan baru dan modern seperti diantaranya pengalaman dari Yongsu Kecil, meningkatkan ketertarikan murid pada “belajar dan bersekolah”; menyuntikkan percepatan kepada kemampuan menyerap aksara dan angka kepada murid. Tumbuh pusat-pusat belajar yang dapat dipahami dan dijangkau oleh anggota masyarakat. Pengetahuan menjadi sesuatu yang sehari-hari. Perencanaan pembangunan di kampung akan menimbulkan sebuah momentum percepatan baru, ketika data yang dibangun oleh anggota masyarakat sendiri, menjadi acuan perencanaan pembangunan. Pembangunan kemudian memiliki dimensi kedekatan, aktual menjawab persoalan dan hampir pasti manfaat pembangunan kemudian menjadi lebih tepat sasaran.

Hal-hal yang sedang bergerak di masyarakat ini: partisipasi yang meningkat, tumbuhnya pusat-pusat belajar yang dapat dipahami dan dijangkau oleh masyarakat terutama karena halangan keterisolasian, dinamika perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang

menghasilkan manfaat bagi masyarakat (kampung).

Tentu saja harus dimengerti bahwa Papua akan membutuhkan waktu untuk menyerap teknologi yang dibutuhkan untuk efektivitas dan efisiensi teknis pembangunan ke depan. Sehingga “kontekstualisasi” harus selalu ditemukan dalam tiap tahap, dan dalam rencana pembangunan di Papua. Baik rencana yang diinisiasi oleh masyarakat, maupun yang gagasannya datang dari pemerintah, mulai dari pemerintah distrik sampai ke pusat.

Tingkat pemanfaatan teknologi ini, terimplementasinya pendidikan kontekstual, atau metode kontekstual dalam menyuarakan pendapat – untuk urusan kesehatan atau urusan strategis lainnya, perlu didukung oleh: kewenangan yang diperluas, penguatan kelembagaan berbasis masyarakat dan pendanaan.

Dalam upaya mendukung percepatan di Papua ini, Pemerintah pusat telah berupaya mengimbangi kecepatan inisiatif di berbagai tempat di Papua dan Papua Barat. Upaya untuk menyokong Tanah Papua lewat pengembangan skema Otsus sedang dikerjakan oleh Kemendagri.

Dukungan terhadap inisiatif skala kecil atau yang bersifat *pilot project* seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Australia di Papua dan Papua Barat, bertujuan mendukung Pemerintah Papua dalam upaya percepatan dan membangun model yang dapat ditingkatkan dan diperluas cakupannya. Kehadiran model-model pendekatan pembangunan ini, akhirnya dapat dipakai sebagai mekanisme pembangunan yang dibiayai dan dijalankan sepenuhnya oleh Pemerintah Papua dan Papua Barat.

Pada akhirnya, diskusi Papua Insights adalah berbicara mengenai paradigma dan cara pandang orang Papua terhadap dirinya sendiri, narasi orang Papua tentang tanah dan dirinya sendiri dan upaya mereka untuk memajukan pembangunan di daerah mereka.



Lab on Wheels

Didukung oleh **Pulse Lab Jakarta**

NARA SUMBER

Diaстика Rahwidiati, Deputy Head of Office, Pulse Lab Jakarta
Muhammad Rezza, Full stack engineer, Pulse Lab Jakarta
Rico Setiawan, Design researcher, Pulse Lab Jakarta

Saat ini di Indonesia, produksi data di era digital telah dikembangkan secara masif untuk dimanfaatkan untuk pembangunan dan aksi kemanusiaan. Khususnya dalam konteks Indonesia, produksi data banyak digunakan untuk mendesain kebijakan pembangunan baru.

Pulse Lab Jakarta adalah inisiatif bersama Pemerintah Indonesia dan PBB, yang bernaung dibawah *United Nations Global Pulse*. Sekjen PBB setelah krisis finansial global 2008 membangun inisiatif

untuk menggunakan data digital yang dihasilkan dari keseharian interaksi manusia dengan platform digital untuk memetakan mana saja daerah yang rentan dan berisiko.

Analisis kemudian dibangun berdasarkan pemetaan tersebut sehingga diharapkan berkontribusi pada kebijakan pada pengurangan kemiskinan. Bagaimana memanfaatkan sumber data baru untuk memetakan kemiskinan? Untuk itu, *Pulse Lab Jakarta*, selain terdiri atas data science, juga mengintegrasikan aspek *social systems* dari big data sehingga konteks data bisa dipahami, termasuk meneliti perilaku manusia baik terkait lokasi, konten, sensor dalam konteks jejak digital yang dihasilkan.

“Data tidak bisa berdiri sendiri. Data harus dipahami konteksnya. Memahami konteks data berarti memahami keterbatasannya, data tersebut mewakili siapa, dan digunakan untuk tujuan apa” – Diaстика, Pulse Lab Jakarta



Kegiatan *Lab on Wheels* dalam *Side Event* kemudian dilanjutkan dengan melakukan latihan memetakan perjalanan data oleh peserta, dengan menyoroti aktivitas yang dilakukan dalam satu hari setelah bangun tidur, kemudian mengidentifikasi *touch points* dari aktivitas yang dilakukan seperti mengunggah foto di Instagram, tweet di Twitter, ataupun memberikan update di Facebook. Setelah itu, data *touch points* yang digunakan kemudian diberikan gambaran bahwa aktivitas atau interaksi yang dilakukan dengan teknologi dapat menjadi titik awal dalam pengaplikasian big data.

Exercise yang dilakukan kemudian digunakan untuk memahami bagaimana kompilasi data tersebut menggambarkan perilaku manusia secara masif, menghimpun *big data*. Sebagai contoh, dalam statistik yang menggambarkan pola perpindahan orang di Kawasan Jabodetabek; *haze gazer* untuk memanfaatkan kombinasi berbagai sumber data (termasuk media sosial) untuk melacak dampak asap

kabut; atau menganalisis pergerakan populasi saat terjadi bencana.

Melalui *Lab on Wheels*, Pulse Lab Jakarta memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi non-pemerintahan di Kawasan Timur Indonesia tentang manfaat penggunaan inovasi dan sumber data baru untuk penyusunan kebijakan pembangunan sekaligus mengevaluasi program pembangunan. Fokus kegiatan *Lab on Wheels* adalah untuk memahami *touch points* dalam konteks *big data* melalui kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Selain itu, tujuan *Lab on Wheels* adalah untuk mengidentifikasi bagaimana dataset tersebut dapat digunakan untuk mendesain kebijakan dan program pembangunan, sehingga peserta dapat memahami pada metode dan inovasi baru yang relevan untuk percepatan pembangunan.



Masyarakat Terlibat, Hasil Belajar Murid Meningkatkan

Didukung oleh **KIAT Guru, TNP2K**

Martinus Durvan, SP, MMA (Kabid Pembangunan Desa Dinas PMD Manggarai Timur)

Elfrida Jerahi, S.Ag. (Kepala SDI Bea Nanga, Lambaleda, Manggarai Timur)

Alfiana Pamut (Ketua Kelompok Pengguna Layanan SDI Golo Popa, Lambaleda, Manggarai Timur)

Kartiyus, SH,M.Si (Kepala BAPPEDA Kabupaten Sintang)

Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru) hadir dalam untuk berbagi pengetahuan tentang inovasi yang dilakukan dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar pendidikan di desa-desa sangat tertinggal. Bersama dengan TNP2K dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Timur di provinsi NTT beserta kabupaten Sintang, Landak dan Ketapang di provinsi Kalimantan Barat telah merintis program KIAT Guru sejak bulan Oktober 2016. Sebelum dilaksanakan di 5 (lima) kabupaten tersebut, mekanisme dan instrumen rintisan KIAT Guru juga telah diujicobakan di Keerom, Provinsi Papua; Kaimana, Provinsi Papua Barat; dan Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Setelah berjalan lebih dari setahun, program ini telah berhasil meningkatkan hasil belajar murid dengan memberdayakan masyarakat dan orang tua murid untuk terlibat dalam pendidikan, serta mengaitkan pembayaran tunjangan khusus guru dengan kehadiran dan kualitas layanan guru di sekolah.



Dalam bentuk *talkshow* interaktif, perwakilan Pemerintah Daerah beserta perwakilan sekolah dan masyarakat dari kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur dan Sintang sebagai pelaku KIAT Guru diundang untuk menyampaikan inovasi dan praktik pelaksanaan program. Talkshow interaktif akan dimoderasi oleh Tim Pelaksana Nasional KIAT Guru TNP2K, dimana masing-masing narasumber akan diberi pertanyaan kunci. Setelah itu, sesi dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang berfokus kepada tahapan yang dibutuhkan untuk mengadopsi pendekatan KIAT Guru agar masyarakat, sekolah, dan pemerintah dapat bersama-sama meningkatkan capaian pendidikan, maupun mengadopsi pendekatan KIAT Guru untuk peningkatan capaian layanan dasar lainnya. Jajaran pemerintah daerah yang hadir dalam talkshow ini mendapatkan insiprasi tentang bagaimana caranya meningkatkan layanan pendidikan maupun layanan dasar lainnya dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Pada kesimpulan diskusi, diharapkan semua pemangku kepentingan yang sudah maupun yang akan melakukan harus

memiliki satu tujuan demi kepentingan terbaik anak. Selain itu, masyarakat sebagai pengguna layanan perlu sadar akan hak terhadap pendidikan dan perlu berorganisasi untuk memastikan hak tersebut dipenuhi. Guru atau sekolah juga perlu menyadari posisi sebagai penyedia pelayanan pengajaran kepada siswa sehingga tidak sungkan untuk dinilai akuntabilitas oleh masyarakat maupun dikaitkan tunjangannya dengan kinerja. Dari sisi pemangku kebijakan dan pemerintah, perlu diterapkan tujuan yang sama, selain daripada komitmen pemerintah kabupaten yang konkrit. Misal: koordinasi antar OPD, anggaran, keberanian membuat terobosan. Kesimpulan terakhir menitikberatkan pada perlunya Pemerintah Pusat perlu mendengarkan inisiatif dan kinerja pemerintah daerah sehingga program KIAT Guru dilaksanakan secara nasional.



Kemandirian Pangan dari Desa Berdaya

Didukung oleh **OXFAM Indonesia**

NARA SUMBER

Widiyanto dan Said Abdullah (Program Right to Food, OXFAM Indonesia)

Armin Salassa (Pegiat Pertanian Alami dari Desa Salassae, Kabupaten Bulukumba)

Ketersediaan pangan merupakan hak yang mendasar dalam menciptakan standar kehidupan yang memadai. Pengakuan hak atas pangan dalam kebijakan pemerintah merupakan hal mendasar bagi perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam keterkaitannya dengan kerawanan pangan. Hal ini memungkinkan setiap orang untuk mendesak hak masing-masing atas pemerintah apabila tidak terpenuhinya hak tersebut.

Melihat pada konteks Indonesia, menyorot pada hak rakyat atas pangan sebagaimana tercantum dalam Konvensi International pada Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Namun demikian, kebijakan pangan sering dikaitkan dengan isu stabilitas nasional, yang mengakibatkan fokus pangan hanya disoroti dalam lingkup nasional, bukan pada lingkup akar rumput dan rumah tangga sehingga isu sosial pada hak rakyat atas pangan kerap muncul di daerah.

Widiyanto dan Said Abdullah dari Program Right to Food OXFAM Indonesia menjadi narasumber dalam side event bertajuk Kemandirian Pangan Desa Budaya, dengan menyoroti praktik baik terkait hak atas pangan di Desa Boru Kedang, Flores Timur. Dalam pemaparannya, Widiyanto dan Said Abdullah berbagi cerita mengenai para petani di Desa Boru Kedang, Flores Timur, yang mengungkapkan bahwa pupuk bersubsidi adalah barang langka dan mahal bagi mereka. Langka, karena tidak hanya



jarangnya pupuk tersebut tersedia, tetapi juga karena jarak yang jauh untuk mendapatkannya, sehingga biaya yang dikeluarkanpun semakin lebih besar. Keterbatasan input pertanian menyebabkan produktivitas usaha pertanian relatif menjadi semakin rendah.

Hak atas pangan merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Dalam rangka pemenuhan hak atas pangan, maka upaya perlu terus dilakukan pada aspek ketersediaan dan akses mendapatkan pangan. Pada aspek ketersediaan, penyediaan input menjadi penting untuk dilakukan. Dengan input yang memadai, maka diharapkan produksi dapat meningkat, yang menyebabkan ketersediaan pangan pun semakin meningkat. Salah satu kebijakan terkait penyediaan input pertanian adalah subsidi pupuk, termasuk pupuk organik. Bagi petani, sayangnya kebijakan ini belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat.

Memahami persoalan ini, upaya yang dilakukan di Desa Boru Kedang adalah mendorong adanya perubahan kebijakan pada level desa. Melalui BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), didorong tersedianya Alokasi Dana Desa untuk mendukung penyediaan dan

produksi input pertanian utama, yaitu pupuk. Untuk memperkuat gagasan dan dampaknya, inisiatif ini didorong dan melibatkan desa-desa yang ada di lingkup kecamatan. Pemerintah desa, melalui BUMDES, yang ada di Kecamatan Wulangitang bersepakat untuk berkolaborasi dengan berbagi modal. Untuk itu, kolaborasi yang dilakukan bersama tidak hanya dalam kerangka distribusi, namun juga permodalan. Setiap BUMDES dari desa-desa yang berkerjasama bertanggungjawab untuk mendistribusikan pupuk ke petani di masing-masing desa. Dengan demikian akses petani atas input pertanian lebih baik.

Dalam side event ini pula, Armin Salassa, pegiat Pertanian Alami dari Desa Salassae, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan juga berbagi mengenai upaya-upaya lokal dari masyarakat di Desa Salassae yang meninggalkan praktik-praktik konvensional dalam pertanian dan kembali ke pertanian alami. Dalam sesi ini, Armin Salassa berbagi bagaimana pertanian alami yang telah dipraktikkan pada akhirnya berkembang menjadi praktik baik dalam menopang perekonomian para petani di Desa Salassae.



Youth Showcase

Didukung oleh
UNFPA (United Nations Populations Fund)

NARA SUMBER

Margaretha Sitanggang (Program Analyst, Youth and Adolescent Sexual and Reproductive Health, UNFPA)

Rahmat Hidayat (Floating School, Sail to Serve – Sekolah Terapung)

Sesi Side Event Youth Showcase dibagi menjadi dua sesi, yaitu mengenai Indeks Pembangunan Pemuda dan Sekolah Terapung.

Indeks Pembangunan Pemuda

"IPP adalah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia," – Margaretha Sitanggang, UNFPA

Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis Indonesia dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang produktif dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Nilai penting ini semakin terasa kuat apabila hal ini dihubungkan dengan fenomena bonus demografi yang tengah dan akan dialami Indonesia saat ini hingga beberapa tahun ke depan.

Pembangunan pemuda sendiri perlu ditopang oleh beragam kebijakan yang berbasis data dan informasi. Pada tanggal 13 Juli 2018

yang lalu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Indonesia 2017. IPP 2017 ini merupakan indeks pemuda yang pertama di Indonesia dan merupakan hasil kolaborasi antara Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS) dan United Nations Population Fund (UNFPA). Penyusunan IPP ini turut melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Indeks Pembangunan Pemuda sendiri adalah suatu alat ukur yang terdiri dari beberapa indikator untuk menggambarkan kondisi pembangunan pemuda pada saat tertentu. IPP berperan penting dalam membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat nasional dan provinsi untuk meninjau keefektifan kebijakan dan program yang berkaitan dengan pembangunan pemuda yang selama ini telah dimulai oleh pemerintah. IPP mencakup 5 domain, yaitu mencakup lima domain yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.

Secara keseluruhan, proses merancang IPP terdiri dari beberapa tahap. Pertama, melakukan tinjauan literatur tentang pembangunan pemuda dan beberapa pengalaman dalam menyusun indeks yang digunakan sebagai dasar untuk memilih domain, indikator, dan formula



penghitungan. Kedua, konsultasi dengan para pakar dan para pemangku kepentingan untuk menetapkan domain, indikator, bobot indikator, dan hal-hal lain yang relevan dari sudut pandang kebutuhan dan tujuan para pemangku kepentingan. Ketiga, eksplorasi, kalkulasi, dan analisis data yang bersifat teknis. Keempat, memasukkan umpan balik dan tanggapan yang relevan dari para pakar mengenai hasil Indeks ke dalam laporan IPP. Kelima, diseminasi laporan melalui beragam media untuk memperkuat prakarsa pembangunan dan kebijakan publik berbasis bukti mengenai pemuda.

Dalam diskusi Youth Showcase, Margaretha Sitanggang memberikan penekanan pada hasil IPP tahun ini dalam cakupan 12 provinsi Kawasan Timur Indonesia dalam lima domain IPP, dan perbandingannya dengan angka IPP dalam cakupan Indonesia secara keseluruhan. Laporan IPP ini diharapkan sebagai titik awal untuk mengukur keadaan saat ini dan dampak berbagai kebijakan dan program yang terkait dengan pembangunan pemuda. Pembangunan pemuda membutuhkan intervensi kebijakan dan keterlibatan para pemangku kepentingan yang lebih luas. Dalam intervensi dan keterlibatan pemangku kepentingan ini, selalu penting untuk menempatkan pemuda sebagai subyek dan aktor utama, untuk membuat pemuda memainkan peran bagi dirinya, juga bagi bangsanya kini dan nanti.

Floating School (Floating School – Sail to Serve)

Pada sesi kedua Side Event Youth Showcase, Rahmat Hidayat berbagi tentang program Floating School – Sail to Serve.

Dalam presentasinya, Rahmat Hidayat mengungkapkan perjalanan awal dari Floating School yang dirintis bersama beberapa sahabat pada tahun 2016, daerah asal mereka yaitu Kabupaten Pangkajene Kepulauan masih termasuk dalam kategori salah satu daerah tertinggal di Sulawesi Selatan. Dengan situasi tersebut, mendorong mereka untuk berbuat sesuatu untuk meningkatkan pembangunan di daerahnya. Setelah rembuk bersama, ide Floating School kemudian dikonsepsikan. Ide tersebut dikembangkan menjadi program sekolah informal, yaitu memberikan bimbingan tambahan dan suplemen dari pendidikan formal yang didapatkan oleh anak-anak pulau. Pelajaran yang diberikan pula mengikut dan relevan pada hal-hal yang diminati oleh anak-anak pulau.

The Floating School atau Sekolah Terapung dalam perjalanannya adalah kapal semi tradisional yang menyediakan buku-buku, alat tulis, materi belajar, dan fasilitator yang berlayar ke pulau-pulau di Kabupaten Pangkep untuk memberikan workshop dalam beberapa tema pelajaran. The Floating School dibangun dengan visi meningkatkan kualitas pemuda di pulau melalui workshop kreatif yang dapat meningkatkan kemampuan mereka berdasarkan minat dan bakat mereka.

Program enam bulan sejak Februari 2017 ini, setiap hari Minggu selama 2 jam di tiap pulau (Pulau Saugi, Satando, dan Sapuli). Kelas workshop dilaksanakan dan difasilitasi oleh fasilitator profesional dan ahli di bidangnya. Workshop terdiri dari Workshop Seni (Menggambar, Musik, Menari, dan Prakarya), Media dan Teknologi (Fotografi, Teknik Dasar Komputer, dan Desain Grafis), dan Workshop Menulis. Di akhir program setelah enam bulan pembelajaran, peserta workshop akan diberikan kesempatan untuk menampilkan karya-karyanya dalam bentuk pameran dan pertunjukkan di Kota Pangkajene.

Reses Partisipatif: Narasi Rakyat di Legislatif

Didukung oleh
MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kestaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan)

NARA SUMBER

Drs. Idrus, M.Si (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kabupaten Maros)

Ir. Haeriah Rahman (Fraksi PAN, Anggota DPRD Kabupaten Maros)

Yosephine M. Palamba, S.Th. (Fraksi Golkar, Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja)

Reses merupakan salah satu mekanisme formal bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi rakyat selaku konstituen sekaligus sebagai wadah bagi masyarakat untuk bertemu dan menyampaikan permasalahannya kepada anggota DPR/DPRD. Selama ini, reses yang dilakukan oleh anggota DPR/DPRD secara umum hanya sebatas pertemuan tatap muka, di mana anggota DPR/DPRD berceramah, dilanjutkan dengan tanya jawab seadanya oleh beberapa orang tertentu. Reses pun hanya merupakan pertemuan antara anggota DPR/DPRD, aparat pemerintah, dan tokoh masyarakat, yang sebagian besar adalah laki-laki. Karena itu, sebagian besar konstituen tidak mengetahui wakilnya di DPR/DPRD. Usulan dalam reses juga umumnya berupa infrastruktur fisik, karena peserta reses didominasi oleh tokoh masyarakat dan laki-laki. Sulit menemukan usulan berupa kebutuhan masyarakat miskin, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya.



Reses Partisipatif adalah salah satu metode reses yang dikembangkan oleh Program MAMPU Yayasan BaKTI yang menggunakan metode partisipatif dimana konstituen ditempatkan sebagai subyek dalam reses dan diujicobakan sejak tahun 2015. Dengan metode partisipatif, konstituen diundang untuk menjadi peserta dalam pertemuan mewakili seluruh konstituen di suatu daerah pemilihan atau wilayah. Konstituen juga mewakili berbagai unsur di dalam masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang selama ini mengalami marginalisasi dalam pembangunan, seperti perempuan, perempuan miskin, anak, kelompok disabilitas, kelompok minoritas, dan kelompok rentan dan marjinal lainnya. Reses Partisipatif mengutamakan peserta dari perwakilan kelompok tersebut antara 50-70%.



Sejak 2015 hingga 2018 Reses Partisipatif telah dilaksanakan oleh beberapa anggota DPRD di wilayah Program MAMPU-BaKTI: Kota Parepare, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Maros, Kota Ambon, Kota Kendari, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, dan Kabupaten Belu. Tahun 2018 Reses Partisipatif direplikasi oleh anggota DPRD Kabupaten Sleman, DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, dan DPRD Kota Bengkulu.

Dalam side event yang diselenggarakan kali ini, dua orang anggota DPRD dari Kabupaten Maros dan Kabupaten Tana Toraja mengungkapkan beberapa poin penting mengenai reses partisipatif. Haeriah Rahman, anggota DPRD Maros menekankan fungsi anggota DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dikuatkan oleh mekanisme reses partisipatif,

karena memudahkan anggota DPRD dalam memperoleh informasi di lapangan, dan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi kepada wakilnya, karena model pertemuan yang lebih ramah, dan informal.

Sementara itu, Yosephine Palamba, anggota DPRD Tana Toraja mengungkapkan bahwa reses partisipatif baru beliau lakukan di tahun 2017 setelah tiga periode sebagai anggota dewan, dan telah merasakan manfaat besarnya. Manfaat tersebut karena reses partisipatif menghargai suara perempuan dan masyarakat miskin yang sebelumnya tidak terdengar suara aspirasi dan keterwakilannya.

Sementara itu, Idrus, Kepala DPPA Maros mengungkapkan bahwa dalam menjalankan tugas-tugas semakin mudah karena anggota dewan juga menguasai permasalahan perempuan dan anak, sehingga mendukung program dan penganggaran untuk dinas yang beliau pimpin. Program seperti pembentukan Peraturan Daerah mengenai Kabupaten Layak Anak dan Pengarusutamaan Gender menjadi lebih cepat dan tepat sasaran karena beberapa anggota DPRD mendukung serta berbagi pengetahuan kepada anggota dewan lainnya. Beliau mengungkapkan bahwa pelaksanaan reses partisipatif yang tematik anak dan perempuan menjadi sesuatu yang efektif, karena suara mereka akan didengar langsung oleh anggota dewan.

Dampak dari reses partisipatif pada akhirnya adalah mendorong optimalisasi Tupoksi DPRD berdasarkan data dan fakta di lapangan yang diperoleh saat reses. Permasalahan perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya mendasari usulan peraturan daerah, pembahasan anggaran di DPRD dan pengawasan implementasi program pemerintah di lapangan. Juga, metode reses semakin mendekatkan hubungan antara rakyat sebagai konstituen dengan anggota DPRD sebagai pemegang amanah dalam pemerintahan.

Developing Inclusive and Creative Economies

Didukung oleh **British Council**

NARA SUMBER

Ari Sutanti (Program Manager British Council)
Dicky Senda (Lakoat.Kujawas)

Dalam Side-Event ini, Ari Sutanti menjelaskan bahwa British Council telah meluncurkan sebuah program yang disebut Developing Inclusive and Creative Economies (DICE) yang akan mendukung kewirausahaan sosial dan kreatif di Inggris dan lima negara berkembang utama: Brasil, Mesir, Indonesia, Pakistan, dan Afrika Selatan.

DICE mengambil pendekatan lintas sektoral yang inovatif yang memanfaatkan pengalaman dan keahlian Inggris dalam ekonomi kreatif dan sosial untuk mempromosikan pembangunan inklusif dan mendukung kemajuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Program ini akan beroperasi pada tingkat kebijakan, kelembagaan dan individu. DICE akan dijalankan bersama beberapa perusahaan swasta di Inggris, dan beberapa organisasi sektor pendukung seperti Impact Hubs, accelerators dan universitas yang bekerjasama dengan mitra-mitra di negara-negara tersebut.



Selain itu, DICE menawarkan Hibah Kolaborasi antara Inggris dan organisasi dan perusahaan dengan mitra di lima negara (termasuk Indonesia) untuk mengatasi masalah pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Investasi akan fokus pada aksi pemberdayaan perempuan baik anak dan dewasa, menumbuhkan lapangan kerja kaum muda dan mendukung



penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya.

Dalam menjalankan programnya, DICE menerapkan pendekatan di tiga tingkatan ekonomi untuk menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Pertama, DICE bekerjasama dengan

pemerintah dan pemangku kebijakan dalam membangun lingkungan kebijakan dimana kewirausahaan kreatif dan sosial bisa tumbuh dan berkembang didasarkan pada portfolio penelitian DICE yang memberikan bukti bagaimana membangun ekosistem yang membangun tersebut.

Dari sesi kelembagaan, DICE membangun penguatan kewirausahaan kreatif dan sosial melalui Dana DICE (The Dice Fund), yang menghubungkan program-program pembangunan dan proyek-proyek kerjasama. Dana DICE tersebut menawarkan dua jenis hibah yang dirancang untuk mendukung intervensi yang merupakan desain bersama dan pelaksanaan bersama dengan perusahaan kreatif dan sosial di Inggris dan beberapa organisasi sektor pendukung seperti Impact Hubs, accelerators dan universitas.

Pendekatan terakhir ditujukan kepada individu, dengan menawarkan berbagai pelatihan dan mentoring kepada wirausaha kreatif dan sosial dengan berfokus pada pengurangan barrier atau penghalang pada kelompok target DICE untuk berpartisipasi. Di Indonesia, pelatihan ini dilakukan melalui kerjasama British Council dengan universitas, termasuk diantaranya dengan *university-based incubators*.

Dalam Side Event ini pula, Dicky Senda dari Lakoat.Kujawas sebagai salah satu penerima dana hibah DICE memberikan testimoni mengenai pengalaman beliau berpartisipasi dalam program DICE, dari proses pendaftaran, pengalaman selama mengikuti pelatihan, dan memahami pendekatan dan berkolaborasi bersama untuk mendukung kewirausahaan kreatif dan sosial.



Dimensi Baru Kemitraan Antara Organisasi Masyarakat Sipil dan Pemerintah

Didukung oleh **Knowledge Sector Initiative**

NARA SUMBER

Seno Haryo Wibowo (Kepala Seksi Perencana dan Pengawas
Konstruksi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah)

Isono Sadoko (Peneliti Senior AKATIGA)

Pada Maret 2018 lalu pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa No 16 Tahun 2018 yang menggantikan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Salah satu poin perubahan dalam Perpres ini adalah dimungkinkannya keikutsertaan organisasi masyarakat sipil (CSO/NGO) dalam kegiatan Pengadaan Barang dan jJasa (PBJ) pemerintah melalui skema Swakelola Tipe III.

Peraturan ini memberikan payung hukum yang memungkinkan organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk bekerjasama dengan pemerintah di berbagai lini pembangunan termasuk dalam penguatan kualitas pelayanan publik di garis depan, mendorong kebijakan berbasis riset, dan pengurangan kemiskinan. Perpres ini juga memungkinkan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk mendapatkan pendanaan yang diperlukan untuk dapat terus bekerja membantu kelompok-kelompok marjinal di berbagai daerah di Indonesia.



Namun demikian, di tingkat pelaksanaan akan ada beragam tantangan yang perlu diantisipasi. Dari sisi pemerintah, misalnya, adalah bagaimana memastikan bahwa organisasi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengadaan adalah organisasi yang akuntabel dan benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat. Dari sisi CSO di antara tantangannya adalah bagaimana menyesuaikan cara kerja mereka dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang mungkin berbeda dengan yang selama ini dipraktikkan dengan organisasi non-pemerintah.

Swakelola Tipe III yang disebutkan adalah swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) penanggungjawab anggaran dan dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan. Swakelola Tipe III mengacu kepada beberapa pokok pikiran utama yaitu; 1) Berbadan hukum yayasan atau perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kemenkumham; 2) Memiliki NPWP dan telah memenuhi

kewajiban perpajakan tahun terakhir; 3) Memiliki struktur organisasi/pengurus; 4) Memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART); 5) Mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang/jasa yang diadakan; 6) Mempunyai kemampuan manajerial dan pengalaman teknis menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan dalam kurun waktu selama 3 (tiga) tahun terakhir; 7) Memiliki neraca keuangan yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir sesuai peraturan perundang-undangan; dan 8) Mempunyai kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.

“Ormas profesional sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, mengapa sumber daya ini tidak dimanfaatkan optimal?” – Isono Sadoko, Peneliti Senior AKATIGA

Ormas dan NGO sudah memiliki sejarah panjang bekerja bersama pemangku kebijakan dalam melaksanakan pembangunan, perumusan kebijakan, dan melakukan kerja-kerja sosial, termasuk membantu masyarakat marginal serta menggerakkan dan memberdayakan masyarakat. Telah saatnya dengan fasilitas negara yang diberikan melalui Swakelola Tipe III dari Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Ormas, yayasan, dan NGO dapat memanfaatkannya untuk mendorong dan meningkatkan pelaksanaan kinerjanya. Dengan Perpres ini pula, harapan besar bisa menjadi nyata dalam hal pembangunan kepercayaan, kolaborasi dan kerjasama yang erat antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah secara produktif. Apalagi dalam lingkup Kawasan Timur Indonesia, dimana kerja-kerja Ormas difungsikan dan diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat marginal, Perpres 16 dan Swakelola Tipe III, maka ormas daerah pun perlu mengetahui secara rinci bagaimana ketentuan-ketentuan hukum dan teknis dari Swakelola Tipe III tersebut agar dapat diakses.

Galeri Informasi

Galeri Informasi adalah pameran yang menghadirkan informasi dari beragam program pembangunan, yaitu diantaranya adalah dari Ditjen PKP (Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Pemerintah Kabupaten Maros; DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade) Australia; KIAT Guru; British Council; SMERU; UNFPA; OXFAM Indonesia; Invest Co Op; CCPHI – AKATIGA; USAID-IUWASH; dan Asia Pulp and Paper Sinar Mas serta Tenoon.

Pada kesempatan ini DFAT Australia hadir dengan 7 booth yang menampilkan program pembangunan yang didukung DFAT di Kawasan Timur Indonesia seperti program KOMPAK, MAMPU, AIPJ (Australia-Indonesia Partnership for Justice), UNICEF, KSI (Knowledge Sector Initiative) dan Inovasi. Berbagai foto aktifitas ke 6 program tersebut juga ditampilkan dalam bentuk *display* foto.

Booth KIAT Guru menampilkan Kiat Kamera. Kiat Kamera adalah aplikasi berbasis android yang berfungsi sebagai salah satu perangkat pemantauan kehadiran guru di sekolah peserta program rintisan ini.

Booth Invest Co Op menghadirkan informasi terkait program untuk meningkatkan kapasitas produksi petambak rumput laut, bandeng dan udang di Sulawesi Selatan yang bekerja sama dengan beberapa koperasi setempat.

Booth British Council berbagi informasi terkait program DICE (Developing Inclusive and Creative Economies) dan social enterprise. Sementara CCPHI dan AKATIGA serta SMERU menampilkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan beberapa tahun terakhir terkait sektor-sektor pembangunan seperti kesehatan, pendidikan, kebijakan dan lainnya. Dua *booth* pemerintah turut berpartisipasi yakni Pemerintah Kabupaten Maros dengan informasi terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pariwisata dan potensi Maros serta Ditjen PKP Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang menghadirkan informasi terkait peningkatan BUMDES, pembangunan dan pendampingan kawasan perdesaan dan identifikasi kawasan perdesaan. *Booth* USAID-IUWASH menghadirkan informasi terkait program peningkatan akses air minum dan layanan sanitasi bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan serta Oxfam menghadirkan informasi terkait program kesiagaan bencana, program peningkatan partisipasi perempuan dan program cash transfer di Makassar.

Dua booth dari sektor swasta yang mengambil bagian dalam pameran ini adalah Asia Pulp and Paper Sinar Mas serta Tenoon. Asia Pulp and Paper Sinar Mas menampilkan program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di Sumatera sementara Tenoon mendisplay produk-produk kerajinan seperti *note book* dan tas yang berbahan utama kain etnik dari timur Indonesia.





Salam Penutup

WILLI TOISUTA,
Ketua Dewan Pembina
Yayasan BaKTI

Dalam penyampaian penutupnya, Bapak Willi Toisuta menerangkan awal berdirinya BaKTI, untuk menguatkan upaya-upaya pembangunan masyarakat KTI melalui *sharing knowledge* dan *resources*; membangun bersama Kawasan Timur Indonesia. Penyelenggaraan Festival Forum KTI VIII dimaksudkan agar menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi masyarakat, pemerintah daerah dalam mengembangkan program-program pembangunan masyarakat. Itulah sebabnya, dalam Festival Forum KTI yang telah dilaksanakan selama delapan kali, dan menampilkan *Smart Practices*. Hal ini merupakan cara efektif untuk dijadikan model pembelajaran yang dapat dibagi dan apabila bisa untuk direplikasi sesuai kebutuhan masing-masing lokasi komunitas.

Lokal dan Berkelanjutan





Ada banyak contoh yang dapat dibagikan dalam pekerjaan kita bersama, bukan hanya sebagai keberhasilan, tetapi sebagai kekuatan-kekuatan yang membanggakan. Oleh sebab itu, pengalaman yang telah dibagikan bersama perlu didokumentasikan dengan baik dan perlu dibicarakan terus menerus agar pengalaman-pengalaman tersebut bisa berkembang menjadi Praktik-Praktik Cerdas di masa datang.

Festival Forum KTI kali ini sangat membuka mata dan hati kita, menginspirasi kita semua. Begitu banyak contoh-contoh yang diperlihatkan, bahwa dalam kehidupan kita bersama sebagai masyarakat KTI, dapat menemukan banyak hal-hal yang baru dan penting, meskipun sekecil apapun tetap memberikan kontribusi bagi masyarakat. Hal ini tidaklah sederhana. Pengalaman yang telah dibagi adalah sebuah demonstrasi dari suatu kapasitas untuk mentransformasi kekuatan mimpi dan imajinasi ke dalam berbagai aksi dan kegiatan produktif yang telah ditunjukkan.

Sejak dimulainya BaKTI dan Forum KTI, Bapak Willi Toisuta melihat adanya pergeseran sejarah dari kegiatan-kegiatannya. Salah satunya pengembangan dan kemampuan inovasi berbasis teknologi. Untuk itu, *mindset* juga perlu diubah dan disesuaikan berdasarkan pada pergeseran yang telah dikembangkan. Pergeseran lainnya adalah pembangunan yang semakin terfokus kepada pengembangan Indonesia Timur. Kita sebagai bagian besar dari masyarakat Indonesia Timur harus bersiap menghadapi tantangan, nilai, kemampuan, dan tuntutan yang baru yang harus kita tunjukkan bersama di wilayah kerja dan abdi kita masing-masing.

PERSEBARAN PESERTA FESTIVAL FORUM KTI VIII BERDASARKAN INSTITUSI

PEMERINTAH
NASIONAL **21**

PEMERINTAH
DAERAH **220**

LEGISLATIF **23**

SEKTOR
SWASTA **79**

AKADEMISI **54**

LSM **296**

MAHASISWA **72**

PELAJAR **3**

MASYARAKAT/
UMUM **41**

LEMBAGA
INTERNASIONAL **57**

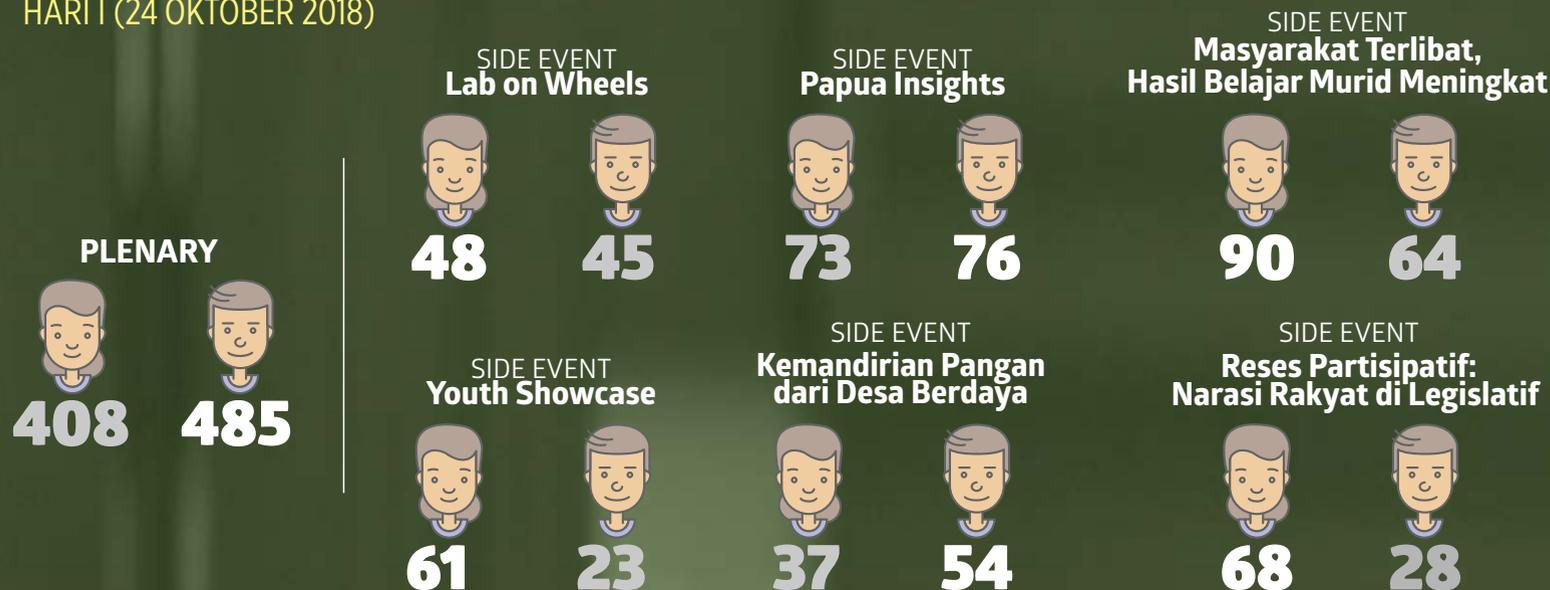
MEDIA **27**

TOTAL **893**



PERSEBARAN PESERTA FESTIVAL FORUM KTI VIII BERDASARKAN JENIS KELAMIN

HARI I (24 OKTOBER 2018)



HARI II (25 OKTOBER 2018)



FESTIVAL FORUM KAWASAN TIMUR
INDONESIA VIII

Lokal dan Berketanjutan



Sekretariat Forum Kawasan Timur Indonesia

Jl. H. A. Mappanyukki No.32, Makassar 90125, Sulawesi Selatan

T.: +62 411 832228, 833383 F.: +62 411 852146

E.: info@bakti.or.id

www.bakti.or.id

www.batukarinfo.com

www.facebook.com/YayasanBaKTI

www.twitter.com/InfoBaKTI